TUGAS AKHIR - DA 184801

DESAIN PENJARA KORUPTOR DENGAN PENERAPAN HUKUMAN SOSIOLOGIS

ANOM SATVIKA DANTA
08111640000033

Dosen Pembimbing
Wawan Ardiyan Suryawan, ST. MT.

Departemen Arsitektur
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2020

TUGAS AKHIR – DA 184801

DESAIN PENJARA KORUPTOR DENGAN PENERAPAN HUKUMAN SOSIOLOGIS

ANOM SATVIKA DANTA
08111640000033

Dosen Pembimbing
Wawan Ardiyan Suryawan, ST. MT.

Departemen Arsitektur
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2020

LEMBAR PENGESAHAN

DESAIN PENJARA KORUPTOR DENGAN PENERAPAN HUKUMAN SOSIOLOGIS

Disusun oleh:

ANOM SATVIKA DANTA

NRP : 08111640000033

Telah dipertahankan dan diterima

oleh Tim penguji Tugas Akhir (DA 184801)

Departemen Arsitektur FT-SPK ITS pada tanggal 07 Juli 2020

Dengan nilai : AB

Mengetahui

Pembimbing	Koordinator Tugas Akhir
Wawan Ardiyan Suryawan, ST., MT.	FX Teddy Badai Samodra, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 197204191998011001	NIP. 19800406 200801 1 008

Kepala Departemen Arsitektur FT-SPK ITS

Dr. Dewi Septanti, S.Pd., S.T., M.T.

NIP. 19690907 199702 2 001

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Anom Satvika Danta

NRP : 08111640000033

Judul Tugas Akhir : Desain Penjara Koruptor Dengan Penerapan Hukuman Sosiologis

Periode : Semester ~~Gasal~~/Genap Tahun 2019/2020

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat adalah hasil karya saya sendiri dan benar-benar dikerjakan sendiri (asli/orisinil), bukan merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain. Apabila saya melakukan penjiplakan terhadap karya karya mahasiswa/orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh pihak Departemen Arsitektur FT-SPK ITS.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akan digunakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

Surabaya, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

Anom Satvika Danta

NRP. 08111640000033

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir dengan judul **Desain Penjara Koruptor Dengan Penerapan Hukuman Sosiologis** dengan baik dan tepat waktu.

Penulis sadar bahwa tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, arahan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua yang selalu memberikan dorongan moral dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab.
2. Wawan Ardiyan Suryawan, ST., MT. selaku dosen pembimbing.
3. Teman-teman perkuliahan yang selalu membantu saat diskusi dan pemecahan masalah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Teman-teman sesama bimbingan sejak Proposal Tugas Akhir hingga Tugas Akhir yang selalu membantu saat berdiskusi dan saling memberi semangat, Muti, Tamaya, Nia, Indah, dan Afin.

Penulis juga sadar bahwa laporan tugas akhir ini, jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis memerlukan kritik dan saran yang mendukung untuk memperbaiki berbagai kekurangan pada laporan tugas akhir ini.

Surabaya, 29 Juni 2020

Penulis

Anom Satvika Danta

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DESAIN PENJARA KORUPTOR DENGAN PENERAPAN HUKUMAN SOSIOLOGIS

Nama Mahasiswa : Anom Satvika Danta

NRP Mahasiswa : 08111640000033

Pembimbing : Wawan Ardiyan Suryawan, ST., MT.

ABSTRAK

Perilaku koruptif di Indonesia yang tinggi menjadikan tindak korupsi suatu perilaku buruk yang menjadi kebiasaan bagi beberapa masyarakatnya. Tindak pidana yang ringan dan terkesan kurang memberi efek jera, dinilai menjadi suatu alasan tingkat presepsi korupsi di Indonesia yang masih tinggi yakni pada urutan 89 di dunia. Kebebasan kuroptor dalam mengatur kehidupannya di dalam penjara juga sangat mudah. Hukuman yang tidak sepadan dengan kenyamanan kondisi tahanan dalam penjara yang membuat koruptor seakan memiliki kuasa dalam tahanan dan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat sekitar.

Penggunaan framework Donna Duerk sebagai alur berfikir dengan pendekatan prilaku menjadi salah satu cara memberi sebuah efek jera bagi koruptor melalui desain yang akan diterapkan. Isu permasalahan awal coba di reduksi dengan menggunakan pendekatan perilaku, pendekatan perilaku ini lebih berfokus kepada segi sosiologi yang menargetkan kontak pelaku dengan masyarakatnya.

Dari pendekatan sosiologi dan beberapa riset yang telah dilakukan, ditemukan bahwa mempermalukan narapidana dan membuat dia mengabdi kepada masyarakat merupakan hal tepat sebagai pengganti sistem penjara lama yang lebih menekankan kepada hukuman fisik. Hukuman mempermalukan narapidana ini dapat dicapai dengan mengajarkan nilai nilai moral yang berada didalam kehidupan bermasyarakat, juga memberikan sedikit privasi bagi narapidana.

Kata kunci : sosiologis, prilaku, koruptor, jera, masyarakat

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

PRISON FOR CORRUPTORS WITH THE APPLICATION OF SOSIOLOGICAL PUNISHMENT

Student's Name : Anom Satvika Danta

Student's ID : 08111540000033

Supervisor : Wawan Ardiyan Suryawan, ST., MT.

ABSTRACT

High corruptive behavior in Indonesia makes corruption a bad behavior which is becoming a habit for some of its people. The sanctions that applied to perpetrator are often not giving a deterrent effect, that factor is considered to be a reason for the level of perception of corruption in Indonesia which is still high at 89th in the world. The freedom of the curator in managing his life in prison is also very easy. Punishment that is not commensurate with the conditions of detention in prison makes the corruptors seem to be in charge in detention and provides a bad example to the surrounding society.

The use of the Donna Duerk method with the behavioral approach is an option of providing a deterrent effect for corruptors through the design to be applied. The issue of initial problems is reduced by using a behavioral approach, this behavioral approach focuses more on the aspects of sociology that target the contact of actors with the community.

From the sociology approach and some of the research that has been done, it was found that humiliating the prisoner and making him serve the community was appropriate as a substitute for the old prison system which emphasized more physical punishment. This punishment of humiliating prisoners can be achieved by teaching moral values that are in the life of the community, also provides a little privacy for prisoners.

Keywords : sociological, behavior, corruption, deterrent effect, society

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Fenomena Korupsi di Indonesia 1

1.1.2 Konsep Penjara yang bersifat Sosiologi Bagi Koruptor 2

1.2 Isu dan Konteks Desain 3

1.2.1 Faktor Manusia 3

1.2.2 Konteks Lahan 4

1.3 Permasalahan dan Kriteria Desain 5

1.3.1 Vonis Hukuman Tersangka Korupsi 5

1.3.2 Indeks Prilaku Anti Korupsi 6

1.3.3 Tanggapan Masyarakat Mengenai Tindak Pidana Korupsi 7

1.3.4 Perilaku Korup Dalam Ruang Lingkup Sosiologi 8

1.4 *Domain Transfer* 8

1.5 Kriteria Desain 9

1.5.1 Berdasar Aspek Sosiologis 9

1.5.2 Kriteria Berdasar Tapak 10

1.5.3 Kriteria Berdasar Aspek Teknis 10

BAB 2 PROGRAM RANCANGAN 11

2.1 Program Aktivitas & Fungsi Bangunan 11

2.1.1 Fungsi Bangunan 11
2.1.2 Program Aktivitas 13
2.2 Kebutuhan Jumlah & Besaran Ruang 15
2.2.1 Kebutuhan Ruang 15
2.2.2 Detail Besaran Ruang 16
2.3 Persyaratan terkait Aktivitas & Ruang 23
2.4 Kajian Tapak dan Lingkungan 25
2.4.1 Pemilihan Tapak 25
2.4.2 Kajian Tapak dan Lingkungan Pada Kawasan Medaeng 26
2.4.2 Analisa Tapak Melalui SWOT 29
2.5 Kajian Peraturan dan Data Terkait 30
BAB 3 PENDEKATAN DAN METODA DESAIN 33
3.1. Alur Berfikir 33
3.2 Pendekatan dan Metode Rancang 34
3.2.1 Pendekatan Prilaku 34
3.2.2 Metode Rancang 35
3.2.3 Form Finding 37
3.3 Kajian Teori Pendukung 38
3.3.1 Pendekatan Sosiologi 38
3.3.2 Pendekatan *Behaviour Setting* 38
3.3.3 Teori Mengenai Hukuman Dengan Rasa Malu 40
3.3.4 Teori Mengenai Sifat Koruptor 43
BAB 4 KONSEP DESAIN 45
4.1 Eksplorasi Formal 45
4.1.1 Konsep Hukuman Sosiologis Pada Modul Housing Narapidana Koruptor 45
4.1.2 Konsep Alur Masuk Kendaraan Bermotor 47
4.1.3 Konsep Aktivitas Narapidana 48
4.1.4 Konsep Vegetasi 50
4.2 Eksplorasi Teknis 51
4.2.1 Konsep Utilitas 51
4.2.2 Konsep Struktur 52
4.2.3 Konsep Material 53

BAB 5 DESAIN 55
5.1 Eksplorasi Formal 55
5.2 Eksplorasi Teknis 59
BAB 6 KESIMPULAN 75
6.1 Kesimpulan Proposal 75
DAFTAR PUSTAKA 77

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Trend Vonis Kasus Korupsi.....6
Table 1.2 IPAK mengalami peningkatan yang tidak stabil.....7
Table 1.3 Hasil Survei Hukuman yang Pantas Bagi.....7
Table 2.1 Aktivitas Narapidana..... 13
Table 2.2 Aktivitas Sipir..... 14
Table 2.3 Kebutuhan ruang penjara..... 16
Table 2.4 Besaran ruang housing..... 16
Table 2.5 Besaran ruang blok fasilitas..... 17
Table 2.6 Besaran ruang blok service.....17
Table 2.7 Besaran ruang pengunjung narapidana.....18
Table 2.8 Besaran ruang perpustakaan..... 18
Table 2.9 Besaran ruang workshop..... 19
Table 2.10 Besaran ruang healthcare.....19
Table 2.11 Besaran ruang fasilitas staff..... 20
Table 2.12 Besaran ruang area dapur.....20
Table 2.13 Besaran ruang makan komunal.....20
Table 2.14 Besaran ruang ibadah.....21
Table 2.15 Besaran ruang keamanan..... 21
Table 2.16 Besaran ruang administrasi.....22
Table 2.17 Total besaran ruang.....22
Table 2.18 Tabel SWOT tapak..... 29

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keadaan ruang sel tahanan yang sudah dimodifikasi..... 3

Gambar 1.2 Sel dengan Fasilitas Lengkap di Penjara Sukamiskin 4

Gambar 1.3 Area Medaeng 5

Gambar 1.4 Domain Transfer.....9

Gambar 2.1 Aktivitas penerimaan Narapirdana.....13

Gambar 2.2 Standar jarak rak buku 19

Gambar 2.3 Sstandar uuran laundry.....20

Gambar 2.4 Standar ukuran gym 21

Gambar 2.5 Stanard jarak antar rak arsip 22

Gambar 2.6 Lokasi Rumah Tahanan Medaeng 25

Gambar 2.7 Pergerakan matahari pada kawasan rutan 26

Gambar 2.8 Aktivitas manusia di sekitar site 26

Gambar 2.9 Lahan yang akan digunakan sebagai extensi rutan 27

Gambar 2.10 Keadaan belakang lahan..... 28

Gambar 2.11 Peta peruntukan Sidoarjo..... 30

Gambar 3.1 Rancangan Alur Berfikir 33

Gambar 3.2 Diagram Metode Architecture Programming 33

Gambar 3.3 Diagram Area Sekitar Lahan..... 35

Gambar 3.4 Diagram Sirkulasi Pengunjung dan Narapidana..... 35

Gambar 3.5 Diagram Grid Structure.....36

Gambar 3.6 Diagram Zonasi bangunan..... 36

Gambar 3.7 Diagram Form Finding..... 37

Gambar 4.1 Diagram Konsep Desain.....45

Gambar 4.2 Modul Sel Tahanan Korpuptor..... 46

Gambar 4.3 Diagram View Dari Massa Pengunjung.....46

Gambar 4.4 Modul Sel Tahanan non Korpuptor..... 47

Gambar 4.5 Enterance Bangunan……..... 48
Gambar 4.6 Diagram Perubahan Perilaku Narapidana..... 49
Gambar 4.7 Diagram Aktivitas Bersama Narapidana..... 49
Gambar 4.8 Diagram Peletakan Vegetasi..... 50
Gambar 4.9 Aksonometri Utilitas Air Bersih..... 51
Gambar 4.10 Aksonometri Utilitas Air Kotor..... 51
Gambar 4.11 Aksonometri Struktur..... 52
Gambar 4.12 Aksonometri Material..... 53
Gambar 4.13 Pemasangan Benton Precast.....54
Gambar 5.1 Bagian Enterance Bangunan 55
Gambar 5.2 Tapak Bangunan..... 55
Gambar 5.3 Area Istirahat Napi..... 56
Gambar 5.4 Lapangan dan Area Jogging..... 56
Gambar 5.5 Parkir Kendaraan Roda Dua..... 57
Gambar 5.6 View dari massa pengunjnung.....57
Gambar 5.7 Area makan komunal..... 58
Gambar 5.8 Ruang Narapidana Koruptor.....58
Gambar 5.9 Siteplan..... 59
Gambar 5.10 Layout..... 60
Gambar 5.11 Denah Lt.1 Massa Housing Narapidana Koruptor.....61
Gambar 5.12 Denah Lt.2 Massa Housing Narapidana Koruptor.....61
Gambar 5.13 Denah Lt 1 Massa Housing Narapidana non Koruptor.....62
Gambar 5.14 Denah Lt 2 Massa Housing Narapidana non Koruptor..... 63
Gambar 5.15 Denah Massa Keamanan..... 64
Gambar 5.16 Denah Mushola..... 65
Gambar 5.17 Denah Lt 1 Fasilitas..... 66
Gambar 5.18 Denah Lt 2 Fasilitas..... 66

Gambar 5.19 Denah Adnministrasi pengunjung..... 67
Gambar 5.20 Denah Massa Pengunjung.....67
Gambar 5.21 Denah Lt 3 Massa Housing Narapidana non Koruptor.....68
Gambar 5.22 Tampak Selatan..... 69
Gambar 5.23 Tampak Timur..... 69
Gambar 5.24 Tampak Barat.....70
Gambar 5.25 Tampak Utara..... 70
Gambar 5.26 Potongan A1,A`..... 71
Gambar 5.27 Potongan A2,A2`..... 71
Gambar 5.28 Denah Util Listrik Lt.1..... 72
Gambar 5.29 Denah Util Listrik Lt.2.....73
Gambar 5.30 Denah Util Listrik Lt.3.....74

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Fenomena Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan suatu bentuk penyelewengan tugas dan penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dampak tindakan korupsi dinilai dapat merusak perkonomian negara, demokrasi dan kesejahteraan umum. Pemerintah telah berupaya untuk menuntaskan kasus korupsi melalui beberapa kebijakan untuk memberantas korupsi. Meskipun demikian, masih banyak kasus korupsi yang tidak ditangani secara serius dan terkesan berbelit-belit.

Tindak korupsi sendiri dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Dalam penanganan dan pemberantasan tindak korupsi wajib dilakukan secara bersama-sama oleh penegak hukum, lembaga masyarakat dan seluruh anggota individu masyarakat.

Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi juga dirasa tidak terlalu berat atau belum bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku. Lembaga pemantau korupsi di Indonesia juga memberikan kritik akan adanya RUKUHP yakni pada Pasal 604 RKUHP yang diadopsi dari Pasal 2 UU Tipikor, yakni terkait perbuatan memperkaya diri (korupsi) mengandung ancaman penjara minimum yang lebih singkat, yakni dari empat tahun menjadi dua tahun.

Dengan isu terkini mengenai RUKUHP juga dinilai mempermudah koruptor, baik dalam masa tahanan dan juga sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi. RUKUHP juga dinilai melemahkan kinerja dari KPK, dikarenakan pemilihan petinggi KPK yang dipilih oleh DPR yang memegang kekuasaan. Bukti dari penindaktanganan yang tidak serius akan kasus korupsi juga dapat dilacak pada pemilihan kepala daerah beberapa bulan lalu. Pemilihan kepala daerah tersebut memberikan kesempatan bagi mantan pelaku korupsi untuk maju mecalonkan dirinya dalam perebutan kuasa tersebut.

Kegiatan korupsi yang tidak tertangani dengan baik ini menjadikan geliat korupsi hal yang terbilang lumrah pada jajaran petinggi aparatur negara, bahkan bagi beberapa masyarakatnya baik dalam sektor dan situasi apapun. Dengan korupsi yang telah dipandang sebagai hal lumrah, maka koruptor dalam melakukan tindak korupsi tidak lagi memiliki rasa malu dan takut.

1.1.2 Konsep Penjara yang bersifat Sosiologi Bagi Koruptor

Konsep penjara sisologi memberikan sebuah hukuman yang dirasa pantas dan dapat menyembuhkan perilaku buruk dari koruptor. Hukuman yang pantas tersebut merupakan hukuman atau sanksi sosial. Penjara sosiologi ini nantinya akan memadukan konteks menyembuhkan prilaku koruptor dan sekaligus memeberikan hukuman kepada koruptor tersebut.

Penjara yang menargetkan sosiologi ini dinilai pantas karena prilaku korupsi bukan hanya merugikan negara, namun juga telah merusak struktur sosial masyarakat. Karena dengan adanya tindak korupsi yang terjadi beruntut kepada masalah kesenjangan dan ketidakadilan pada kehidupan masyarakat.

Konsep penjara sosiologis ini juga akan merestorasi prilaku korupi yang menyimpang pada tatanan masyrakat dengan mempublikasikan kehidupan koruptor di dalam penjara. Memberikan contoh dan petunjuk akan suatu prilaku yang salah dan tidak patut ditiru. Sehingga peran penjara ini nantinya memiliki control sosial yang kuat pada tatanan masyarakat.

Membuka mata koruptor akan bagaimana mendapatkan rezeki merupakan hal yang sulit di mata sosial dan diharapkan hal ini dapat menjadi salah satu hal yang dapat memberikan penyembuhan pada sikap pelaku koruptor sekaligus menjadi hukuman bagi koruptor. Dihadapkan dengan keadaan sosial pada penjara, berinteraksi langsung dengan warga penjara yang mungkin telah menjadi korban dari prilaku korupsi.

Para koruptor juga wajib memberikan kontribusi pada lingkungan sosial dimana koruptor tersebut ditahan. Agar nantinya saat koruptor tersebut telah menemukan kebebasannya, mereka dapat memahami moral apa saja yang terdapat dalam suatu struktur sosial masyarakat.

1.2 Isu dan Konteks Desain

1.2.1 Faktor Manusia

Peran faktor manusia pada konteks ini sangat kuat baik keadaan di dalam dan di luar penjara. Pada situasi terkini keadaan di dalam lapas yang dirasakan oleh para koruptor tidak memberikan efek jera seperti yang masyarakat harapkan. Hal ini dikarenakan koruptor yang memiliki kekuasaan penuh di dalam penjara. Kekuasaan didapatkan dengan melalui perputaran uang di dalam penjara.

Hal yang memicu terjadinya efek kekuasan ini berawal dari buruknya kondisi penjara, baik dari segi nutrisi, kelayakan ruang, dan suasana penjara. Praktik suap di dalam penjara muncul dalam berbagai bentuk. Seperti contoh yakni kebutuhan dasar, rasa tidak puas akan kondisi ruangan penjara membuat mereka melakukan praktik suap dengan sipir. Memudahkan tahanan untuk memasukkan barang yang sebenarnya terlarang berada di dalam sel penjara, seperti kasur, TV, kipas angin, HP bahkan laptop.

Kasus yang terjadi pernah dialami pada lapas Sukamiskin Jawa Barat pada bulan September tahun 2018. Tahanan mendapatkan perlakun yang lebih spesial dibandingkan tahanan lain dengan fasilitas dan ukuran ruangan yang berbeda.

Gambar 1.1 Keadaan ruang sel tahanan yang sudah dimodifikasi

Sumber: http://cms.kabar3.com

Gambar 1.2 Sel dengan Fasilitas Lengkap di Penjara Sukamiskin

Sumber: news.detik.com

Keadaan lapas menunjukkan tuntutan dari para koruptor akan kelayakan penjara. Penyelesaian desain yang dapat di tawarkan tentunya dengan memberi fasilitas ruangan yang layak namun juga tidak berlebihan sehingga membuat pengguna nyaman berada di dalam penjara. Keadaan sel penjara di Indonesia juga sangat terkesan tertutup sehingga kondisi di dalam sel cukup sulit untuk dipantau.

1.2.2 Konteks Lahan

Prilaku dari pelaku korupsi yang kerap kali berusaha untuk kabur dari penjada dengan melakukan suap menuntut sebuah penjara yang berlokasi cukup jauh dari hiruk pikuk kota. Salah satu contoh lokasi yang dapat dimanfaatkan dalam membangun penjara koruptor ini adalah di daerah Medaeng, Sidoarjo. Lokasi Medaeng sendiri merupakan area industri yang berada pada perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, menjadikan lokasi ini cukup terasingkan.Meskipun cukup terasingkan lokasi medaeng ini masih cukup ramai dengan hilir mudik masyrakat menuju Surabaya maupun menuju Sidoarjo.

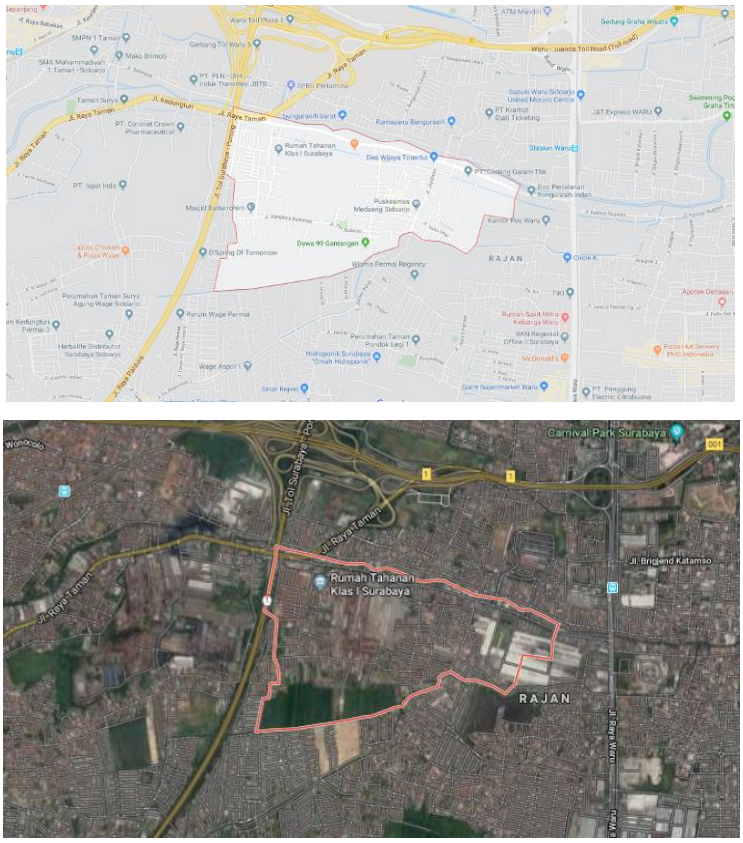

Gambar 1.3 Area Medaeng

Sumber: Google Map

Lokasi yang dipilih berada tepat di sebelah Rutan kelas 1 Medaeng. Rencana pembangunan penjara korupsi akan menjadi sebuah extensi dari Rutan kelas 1. Permasalahan baru yakni over populasi yang dibawa oleh Rutan kelas 1 juga menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan pada desain.

1.3 Permasalahan dan Kriteria Desain

1.3.1 Vonis Hukuman Tersangka Korupsi

Vonis yang kerap kali dijatuhkan oleh hakim tergolong sangat ringan, jika ditimbang dengan melihat kerugian yang telah dilakukan oleh koruptor. Hal ini tidak membuat pelaku koruptor jera, namun secara perlahan mendoktrin masyarakat akan prilaku korupsi bukan merupakan hal yang salah. Sebagai contoh sekitar 76% Terdakwa divonis ringan pada tahun 2016 di tingkat pengadilan tipikor tingkat pertama. Terlihat dari grafik yang disampaikan, menunjukan hasil vonis yang diberikan kepada tersangka korupsi. Sedangkan

pada tahun 2018 data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah vonis kategori ringan mencapai 918 kasus atau 79%. Kategori Sedang (>4 tahun – 10 tahun) sebanyak 180 terdakwa atau 15,49 persen, Kategori Berat (>10 tahun) sebanyak 9 terdakwa atau 0,77 persen. Putusan hukuman untuk terdakwa tindak pidana korupsi pada 2018 rata-rata selama 2 tahun 5 bulan.

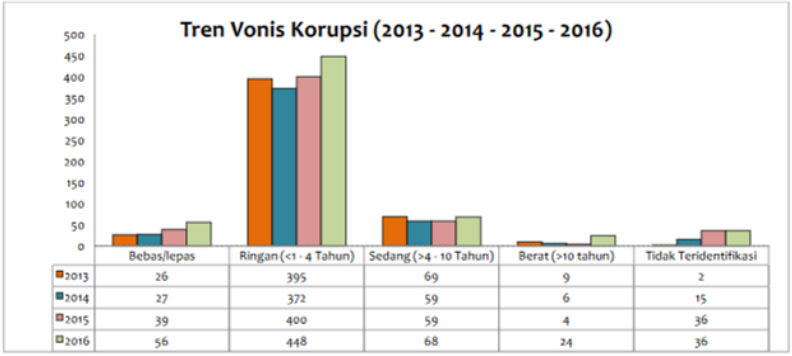

	Bebas/lepas	Ringan (<1 - 4 Tahun)	Sedang (>4 - 10 Tahun)	Berat (>10 tahun)	Tidak Teridentifikasi
2013	26	395	69	9	2
2014	27	372	59	6	15
2015	39	400	59	4	36
2016	56	448	68	24	36

Table 1.1: Trend Vonis Kasus Korupsi

Sumber: www.antikorupsi.org

1.3.2 Indeks Prilaku Anti Korupsi

Tanggapan masyarakat mengenai prilaku anti korupsi berangsur membaik. Namun dari ukuran skala yang telah di sediakan berdasar Indeks Prilaku Anti Korupsi (IPAK) masih tergolong rendah. Juga IPAK hanya mengukur prilaku masyarakat terhadap tindakan korupsi skala kecil. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan pada masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik mulai dari perilaku penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Penanggulangan lebih jauhnya untuk mengedukasi anti korupsi penting untuk tetap dikembangkan.

Table 1.2: IPAK mengalami peningkatan yang tidak stabil

Sumber: mediaindonesia.com

1.3.3 Tanggapan Masyarakat Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Tanggapan warga mengenai hukuman yang pantas bagi koruptor cukup beragam. Bahkan masyarakat yang berkeinginan untuk hukuman mati bagi koruptor sangat tinggi. Namun sekali lagi para koruptor masih terlindung oleh HAM yang mana hukuman mati dapat diarahkan menjadi ke hukuman berat bahkan hukuman seumur hidup.

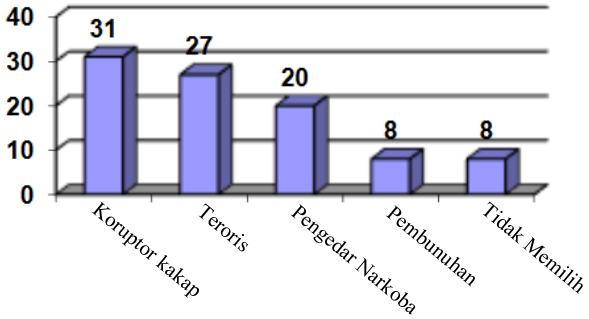

Table 1.3 Hasil Survei Hukuman yang Pantas Bagi

Koruptor Tahun 2016 total 94 responden

Sumber: THE PENALTY FOR THE CORRUPTOR IN THE

SOCIOLOGICAL PERSFEKTIF by Syamsul Haling

1.3.4 Perilaku Korup Dalam Ruang Lingkup Sosiologi

Prilaku korupsi kerap kali dikaitkan dengan prilaku dari sebuah masyaraktnya secara keseluruhan. Seperti yang di sampaikan oleh Huntington (1968) *that corruption, of course, takes place in all kinds of societies, but more plural and intense in society than in others, and more seriously in the early days of modernization than after*. Semakin berkembangnya era globalisasi dan cepatnya laju data yang ada, prilaku korup bukan lagi dilihat dari tiap individu, namun menjadi suatu index tersendiri bagi sebuah negara dan *societies* yang hidup didalamnya.

Tindak korupsi yang tersorot kamera kerap kali merupakan masalah korupsi dalam jumlah besar dan memiliki dampak yang cukup signifikan. Seperti yang Alkostar (2008) sampaikan yakni *"corruption in Indonesia as well as in some other countries is highly correlated with abuse of power from political power holders"*. Namun tindak korupsi ternyata bukan hanya dilakukan oleh petinggi negara, namun sudah menjadi budaya di Indonesia. Menjadi sebuah kebutuhan untuk melakukan suatu upaya guna memicu kehidupan bersosial untuk lebih sadar akan bahaya dalam melakukan suatu tindak korupsi.

1.4 *Domain Transfer*

Domain Transfer penting untuk digunakan guna menerjemahakan aspek atau bidang studi dari luar (arsitektur) kedalam konsep arsitektur. Pada tabel *domain transfer* dibawah dapat dilihat bidang studi luar yakni sosilogi diterjemahkan kedalam ruang lingkup arsitektur. Tujuan adanya domain transfer adalah guna mengetahui konsep dari bidang studi luar yang diterjemahkan ke dalam aspek desain dan memunculkan tujuan desain itu dibuat.

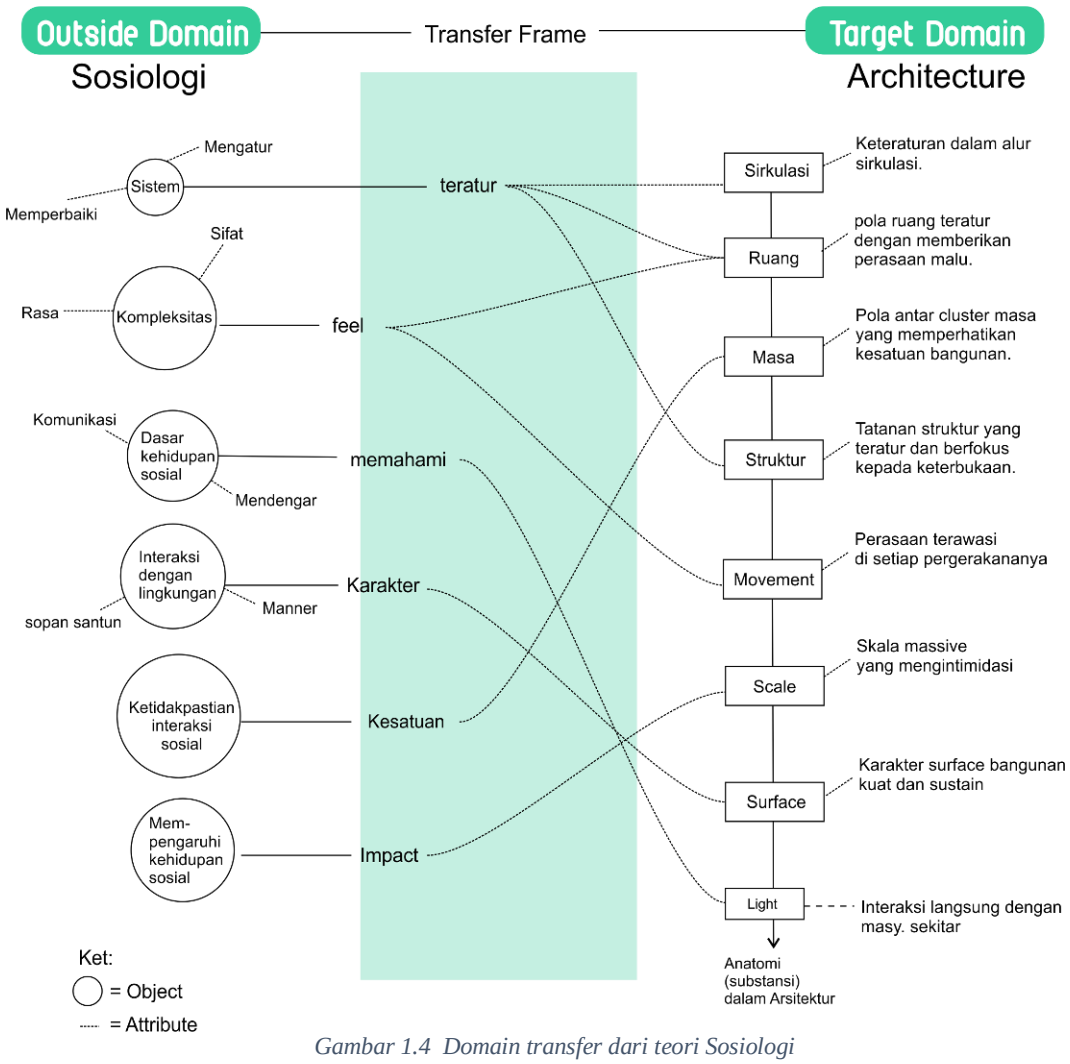

Gambar 1.4 Domain transfer dari teori Sosiologi

Sumber: Data Pribadi

Setelah target *domain* telah dicapai, maka kita dapat menentukan goals dari bangunan ini kedepannya yakni :

- Penjara yang menjadi sebuah hukuman sosiologis
- Alur sirkulasi pada penjara sebagai fungsi keamanan
- Memberikan suatu isolasi atas kekuasaan dari koruptor di dalam penjara

1.5 Kriteria Desain

1.5.1 Berdasar Aspek Sosiologis

a.) Mengkoneksikan penjara existing Medaeng dengan fungsi penjara, Terjadinya sebuah interaksi antara pelaku kejahatan umum dengan pelaku koruptor, penyetaraan tingkat hukuman dan juga perlakuan yang sama.

b.) Menjadi suatu control sosial dimana memberikan contoh prilaku menyimpang yang disampaikan langsung kepada warga. Pemilihan lokasi yang sesaui sangat penting mengetahui value dari bangunan cukup krusial dalam tatanan masyarakat. Diletakkan pada area yang padat akan kegiatan publik merupakan suatu alternative desain.

c.) Fungsi penjara yang disusun ulang, bukan hanya menjadi sebuah hukuman bagi terpidana, namun juga dapat memberikan perbaikan pada diri prilaku maupun masyarakat.

1.5.2 Kriteria Berdasar Tapak

a.) Desain dapat menyesuaikan dengan peraturan mengenai tapak yang sudah ditentukan.

b.) Desain dapat mememberikan sebuah wadah guna pengunjung untuk memanfaatkan lahan parkir bangunan.

c.) Desain mampu memberikan sebuah area hijau guna memaksimalkan area resapan.

1.5.3 Kriteria Berdasar Aspek Teknis

d.) Susunan ruang yang menata pola aktivitas koruptor agar mengatisipasi terjadinya perlakuan suap yang terjadi dalam penjara.

e.) Memperhatikan aspek manusia dalam merancang bangunan, karena tuntutan dari masyarakat akan vonis yang berat untuk diberikan kepada koruptor. Menuntut suatu ruang yang dapat dihuni dengan jangka panjang tanpa melukai mental dari seorang tahanan. Aspek manusia yang dimaksud dapat berupa sirkulasi, tangkat cahaya yang masuk, sirkulasi udara, kebutuhan akan air bersih, dan makanan yang layak.

f.) Memberikan fasilitas yang dapat membantu tahanan untuk memperbaiki dirinya untk lebih baik. Fasilitas yang dimaksud dapat berupa sarana informasi, konsling dan juga latihan fisik.

BAB 2

PROGRAM RANCANGAN

2.1 Program Aktivitas & Fungsi Bangunan

2.1.1 Fungsi Bangunan

Tipologi Bangunan yang dipilih yakni merupakan sebuah penjara, pemilihan fungsi penjara ini lebih terfokuskan kepada penjara untuk koruptor. Pemilihan fungsi yang spesifik ini didasarkan karena kesenjangan yang dialami oleh koruptor di dalam penjara. Koruptor kerap kali memiliki kontrol akan semua yang berada di dalam penjara. Kontrol yang mereka lakukan yakni dengan cara melakukan suap dengan sipir. Dengan memberikan sebuah suatu stimulus kepada sipir untuk melakukan suatu timbal balik kepada narapidana koruptor.

Fungsi penjara akan di ciptakan dengan sistem kontrol yang tersebar di beberapa sudut bangunan sehingga dapat mengurangi terjadinya suap di dalam fasilitas penjara. Fasilitas pendukung dalam sebuah penjara yang akan menjadi fokus utama. Fasilitas pendukung penjara yang nantinya juga menjadi sebuah *tools* dalam efek mengembalikan pola pikir narapidana akan korupsi.

Dari sudut pandang desain bangunan, penjara memiliki sebagian yang berorientasi kepada proses (teknikal seperti bandara atau pabrik) dan juga memiliki orientasi terhadap ruang (seperti sekolah atau kantor). Pergerakan narapida koruptor yang dikendalikan dan dipantau dengan ketat, namun tidak sepenuhnya mengekang pergerakan narapidana menuju *public area*. Kontrol yang dilakukan akan mengaju kepada kontrol di dalam ruang dan di antara ruang. Dengan begitu lingkungan fisik di mana pergerakan tahanan di dalam ruang mudah dikendalikan dan memungkinkan staf penjara membiarkan tahanan keluar dari sel mereka selama jam-jam siang yang tetap terpantau, untuk menghabiskan lebih banyak waktu terlibat dalam kegiatan positif.

Sistem yang akan diterapkan pada penjara ini yakni sistem penjara cluster yang mana merupakan sistem penjara dengan peletakang ruang digolongkan berdasarkan fungsi dan zonging, tidak terkecuali pada housing narapidana non korupsi yang akan diberi sebuah cluster, karena penjara ini sendiri merupakan sebuah penjara extend dari penjara existing yang merupakan penjara yang memiliki system campuran. Bangunan baru akan menanggapi masalah dari penjara exixting yakni *overcrowding,* sehingga diperlukan sebuah cluster antara penjara campuran dan penjara koruptor, karena penjara koruptor yang memiliki level keamanan yang berbeda (lebih tinggi).

Level keamanan penjara menurut Nelson Mandela Rule terbagi menjadi 4 yakni

- Level 1 : Kemanan maksimum dengan tahanan yang sangat berbahaya jika keluar dari tahanan

- Level 2 : Tidak memerlukan keamanan maksimum namun dengan tahanan yang berbahaya jika keluar dari tahanan

- Level 3 : Tahanan yang tidak dapat dipercaya jika diletakkan di keadaan terbuka, tahanan tidak memiliki keinginan untuk kabur.

- Level 4 : Penjara terbuka yang mana tahanan dapat di percaya untuk tidak memiliki keinginan untuk kabur

Cluster extensi penjara eksisting akan diterapkan level 2 dan penjara koruptor akan di terapkan level 1, mengetahui bahwa keinginan bebas dan prilaku suap yang diterapkan koruptor masih sangat sering terjadi di dalam penjara.

2.1.2 Program Aktivitas

Penerimaan Narapidana merupakan aktivitas pertama yang narapidana lakukan. Dan berikut adalah bagan aktivitas yang dilakukan saat narapidana pertama kali di terima.

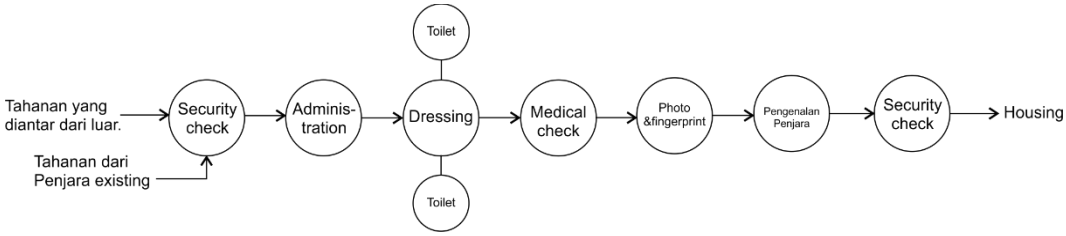

Gambar 2.1 Aktivitas penerimaan Narapirdana

Sumber: Time Saver standards

Tahapan *medical check* merupakan tahapan yang cukup krusial untuk mengetahui keadaan kesehatan narapidana sebelum tahan dan menjadi sebuah keputusan apakah narapidana lebih baik di tahan atau mendapat perwatan intensive. Juga pengecekan kedua kali dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyaluran data maupun barang berbahaya dari pihak penjara sendiri.

Narapidana		
Aktivitas	Lokasi	Waktu alokasi
Bangun Pagi	Individual Housing	06:00
Mandi	Individual Housing	06:00-07:00
Makan Pagi	Communal Kitchen	07:00-08:30
Menemui visitors	Visit area	Batas dua kali seminggu 08:30-10:00
Menelfon kerabat	Visit area (*telephone booth*)	Batas dua kali seminggu 08:30-10:00
Pengajaran ilmu disiplin	Sekolah	10:00 – 12:00
Bebas (Ibadah,olahraga, belajar, makan siang)	Masjid, lapangan, perpustakaan, workshop area, Communal Kitchen	12:00-16:00
Pemeriksaan	Ruang pemeriksaan tahanan (area transisi)	16:00-17:30
Kontemplasi	Individual Housing	17:30-18:00
Makan malam, ibadah, bebas	Communal Kitchen, Masjid	18:00-21:30
Pemeriksaan	Ruang pemeriksaan tahanan (area transisi)	21:30-22:00
Istirahat	Individual Housing	21:00

Table 2.1 Aktivitas Narapidana

Sumber: Data pribadi

Pemeriksaan perlu dilakukan di ruang transisi ketika narapidana memasuki individual housing untuk mencegah perpindahan data suap antar narapidana korupsi dan sipir. Area Transisi ini sendiri merupakan bentuk tanggapan dari pendekatan prilaku dari koruptor yang mencari area residual untuk melakukan kegiatan suap. Area Residual ini nantinya akan menjadi area transisi.

Kemudian dari pendekatan sosiologis narapidana dimana narapidana membutuhkan interaksi dengan sesama untuk memberikan efek therapeutic pada narapidana dapat dijawab dengan beberapa komunal area yang telah disediakan seperti dapur komunal, lapangan, perpustakaan dan masjid.

	Sipir		
Shift	Aktivitas	Lokasi	Waktu alokasi
Pagi-siang	Jaga Pagi	Koridor Housing	06:00- 07:00
	Patoroli Makan pagi	Communal Kitchen	07:00-08:30
	Jaga Individual Narapidana menemui visitors dan menelfon kerabat	Visit area	08:30-10:00
	Patroli saat educational time	Sekolah	10:00 – 12:00
	Jaga ruang pemeriksaan tahanan (area transisi)	Area Transisi	06:00-12:00
Siang-Sore	Patroli area komunal	Masjid, lapangan, perpustakaan, workshop area, Communal Kitchen	12:00-16:00
	Jaga ruang pemeriksaan tahanan (area transisi)	Area Transisi	12:00-18:30
	Patroli Housing	Koridor Housing	12:00-16:00
Malam	Patroli area Makan malam dan area masjid	Communal Kitchen, Masjid	18:00-21:30
	Patroli Housing	Koridor Housing	18:00-22:00
	Jaga ruang pemeriksaan tahanan (area transisi)	Area Transisi	18:00-08:00

Table 2.2 Aktivitas Sipir

Sumber: Data pribadi

Sipir yang menjaga area yang mudah terjadinya transaksi suap yakni pada area transisi dan koridor dari housing akan dilakukan pertukaran regular tiap harinya dengan shift lainnya.

2.2 Kebutuhan Jumlah & Besaran Ruang

2.2.1 Kebutuhan Ruang

Kebutuhan ruang dari penjara wajib memberikan fasilitas yang layak kepada narapidana dan staf atau sipir, berikut adalah kebutuhan ruang total dari penjara koruptor

No	General	Specific
1	Housing Units	Sel Tunggal
		Sel bersama
		Dormitories
		Sel berkebutuhan khusus
2	Blok Fasilitas	Toilet (standar) dan Kamar mandi
		Taman
		Ruang Istirahat
		Ruangan Serbahguna
3	Blok Service	Ruang Staff
		Ruang Janitor
		Ruang Elektrikal
		Ruang Mekanikal
		Kantor pengawas / ruang pertemuan
		Wawancara / ruang konseling
4	Pengunjung Narapindana	Ruang tunggu Tahanan
		Ruang pemeriksaan tahanan (ruang transisi)
		Gerbang pengunjung / penerimaan
		Ruang tunggu pengunjung
		Ruang pemeriksaan pengunjung
		Toilet pengunjung
		Kunjungan Kontak dengan Narapidana
		Kunjungan non-Kontak dengan Narapidana
		Ruang kunjungan resmi
		Staff observation area
5	Perpustakaan	Area studi
		Area rak
		Ruang pemeriksaan tahanan (ruang transisi)
		Toilet tahanan
		Kantor staf
		Toilet staf

6	Workshop	Workshop Area
		Ruang pemeriksaan tahanan (ruang transisi)
		Toilet tahanan
		Kantor staf
		Toilet staf
		Loading area
7	Healthcare Facilities	Ruang konsultasi dan ruang tunggu
		Kantor staf
		Farmasi
		Toilet dan fasilitas mandi (dapat diakses)
		Klinik Gigi
		Fasilitas penyimpanan
8	Fasilitas Staff	Laundry
		Tukang Cukur
9	Area dapur	Memasak dan menyiapkan makanan (dapur)
		Area penyimpanan
		Area pembersihan
		Ruang kantor Staff
10	Area makan komunal	Ruang makan (mess)
		Ruang pemeriksaan tahanan (ruang transisi)
		Toilet tahanan
11	Ruang Ibadah	Masjid
		Area Wudlhu
		Area Ibadah Agama Lain
12	Keamanan	Ruang kontrol
		Kantor keamanan
		Ruang briefing
		Ruang pemeriksaan
		Gudang senjata dan peralatan
		Ruang arsip
		Toilet dan shower
		Ruang Loker Staf
13	Administrasi	Penerimaan tamu
		Kantor
		Catatan dan penyimpanan file
		Ruang rapat
		Toilet staf
		Janitor

Table 2.3 Kebutuhan ruang penjara

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

2.2.2 Detail Besaran Ruang

Detail besaran ruang nantinya akan menjadi persentase kebutuhan lahan, sehingga penaataan lahan dapat dimaksimalkan, juga mempermudah

penerapan pendektan sosiologi dan prilaku dengan penataan dan organisasi ruang.

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Housing Units					
	Sel bersama	6.8m2 for 2 persons dengan kasur bertingkat 2	300	150	1033m2
	Dormitories	28m2 untuk 12 orang dengan kasur bertingkat 3	300	25	700m2
Total					1733m2

Table 2.4 Besaran ruang housing

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

Housing units nantinya akan terbagi menjadi 3 blok sel / tiga lantai.

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Blok Fasilitas	Toilet (standar) dan kamar mandi	2m2	600	250	500m2
	Taman	4m2 per narapidana	600	1	2400m2
	Ruang Istirahat	2m2 per narapudana	600	1	1200m2
	Ruangan Serbahguna	20m2	10	6	120m2
Total					4220m2

Table 2.5 Besaran ruang blok fasilitas

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Blok Service	Ruang Staff	20m2	18	3	60m2
	Ruang Janitor	9m2	4	3	27m2
	Ruang Elektrikal	2m2	1	3	6m2
	Ruang Mekanikal	9m2	2	3	27m2
	Kantor pengawas / ruang pertemuan	20m2	10	3	60m2
	Wawancara / ruang konseling	12m2	4	3	26m2
Total					206m2

Table 2.6 Besaran ruang blok service

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Pengunjung Narapindana	Ruang tunggu Tahanan	12m2	12	2	24m2
	Ruang pemeriksaan tahanan (ruang transisi)	2.5m x 3m	3	2	15m2
	Ruang tunggu pengunjung	12m2	12	2	24m2
	Ruang pemeriksaan pengunjung	3m x 4m	3	2	24m2
	Toilet pengunjung	30m2	12	2	60m2
	Kunjungan Kontak dengan Narapidana	4m2	24	12	48m2
	Kunjungan non-Kontak dengan Narapidana	3m2 for two person meet	24	12	26m2
	Ruang kunjungan resmi	9m2	24	2	18m2
	Staff observation area	12m2	4	2	24m2
Total					263m2

Table 2.7 Besaran ruang pengunjung narapidana

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Perpustakaan	Area studi	40m2	20	1	40m2
	Area rak	15m2	-	1	15m2
	Ruang pemeriksaan tahanan (ruang transisi)	2.5m x 3m	3	1	7.5m2
	Toilet Staff	3m2	4	3	6m2
	Kantor staf	12m2	4	1	12m2
	Toilet tahanan	2m2	25	1	2m2
Total					82.5m2

Table 2.8 Besaran ruang perpustakaan

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

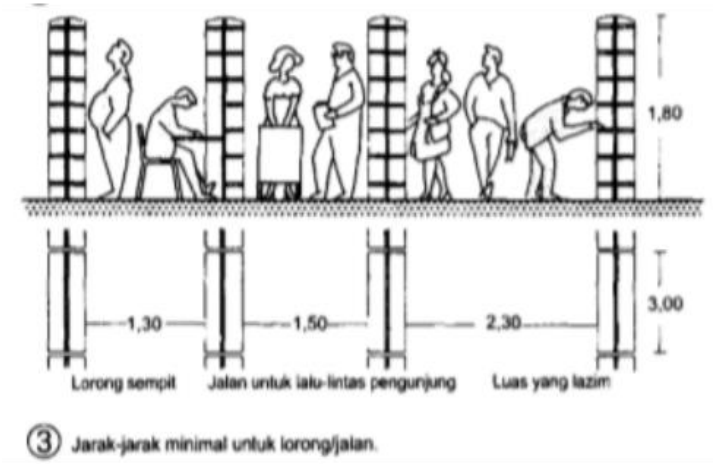

Gambar 2.2 Standar jarak rak buku

Sumber: Neufert Jilid 2

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Workshop	Workshop Area	60m2	25	1	60m2
	Ruang pemeriksaan tahanan (ruang transisi)	2.5m x 3m	3	1	7.5m2
	Loading area	9m2	2	1	9m2
	Toilet Staff	3m2	4	3	6m2
	Kantor staf	12m2	4	1	12m2
	Toilet tahanan	2m2	25	1	2m2
Total					96,5m2

Table 2.9 Besaran ruang workshop

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Healthcare Facilities	Ruang konsultasi dan ruang tunggu	40m2 + 12m2	14	1	52m2
	Farmasi	150m2	3	1	150m2
	Fasilitas penyimpanan	100m2	-	1	100m2
	Klinik Gigi	20m2	4	1	20m2
	Ruang pemeriksaan tahanan (ruang transisi)	2.5m x 3m	3	3	22,5m2
	Toilet Staff	3m2	20	4	12m2
	Ruang Dokter	12m2	2	3	36m2
	Toilet dan fasilitas mandi (dapat diakses)	5m2	50	5	25m2
Total					417,5m2

Table 2.10 Besaran ruang healthcare

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Fasilitas Staff	Laundry	96m2	10	3	288m2
	Tukang Cukur	12m2	6	6	72m2
Total					360m2

Table 2.11 Besaran ruang fasilitas higienis

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

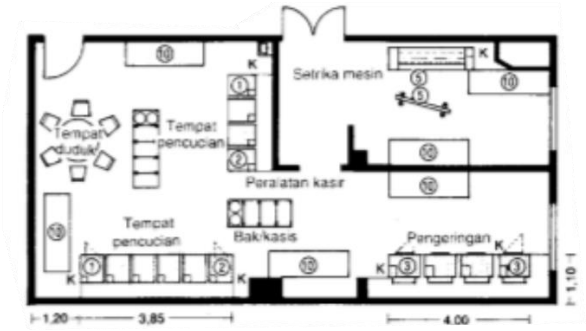

Gambar 2.3 Sstandar uuran laundry

Sumber: Neufert Jilid 2

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Area dapur	Memasak dan menyiapkan makanan (dapur)	60m2	10	1	60m2
	Area penyimpanan	100m2	-	1	100m2
	Area pembersihan	50m2	4	1	50m2
	Ruang kantor Staff	20m2	10	1	20m2
Total					230m2

Table 2.12 Besaran ruang area dapur

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Area makan komunal	Ruang makan (mess)	1m2 per Narapidana	600	1	600m2
	Ruang pemeriksaan tahanan (ruang transisi)	2.5m x 3m	3	2	15m2
Total					615m2

Table 2.13 Besaran ruang makan komunal

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

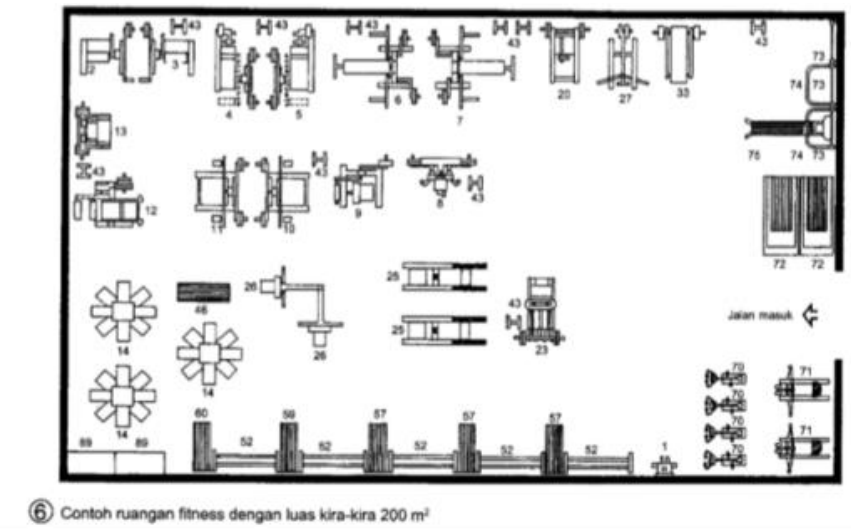

Gambar 2.4 Standar ukuran gym

Sumber: Neufert Jilid 2

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Ruang Ibadah	Masjid	0.8m x 1.2m untuk tiap nrapidana	500	1	480m2
	Area Wudlhu	0,8m x 1,5m untuk tiap narapidna	500	5	60m2
	Area Ibadah Agama Lain	100m2	100	1	100m2
Total					640m2

Table 2.14 Besaran ruang ibadah

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Keamanan	Ruang kontrol	6m2	3	1	6m2
	Kantor keamanan	10m2	4	1	10m2
	Ruang briefing	50m2	30	1	50m2
	Ruang pencarian	5m2	3	1	5m2
	Gudang senjata dan peralatan	15m2	-	1	15m2
	Ruang arsip	20m2	2	1	20m2
	Toilet dan shower	3m2	2	1	9m2
Total					115m2

Table 2.15 Besaran ruang keamanan

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

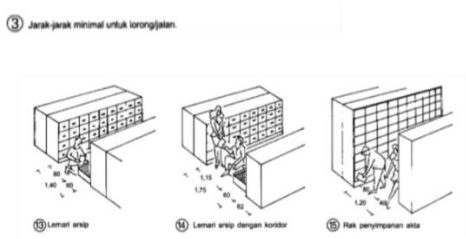

Gambar 2.5 Stanard jarak antar rak arsip

Sumber: Neufert Jilid 2

General	Specific	Standar	User	Jumlah ruang	Besaran
Administrasi	Penerimaan tamu	25m2	5	1	25m2
	Kantor	20m2	10	1	20m2
	Catatan dan penyimpanan file	50m2	2	1	50m2
	Ruang rapat	40m2	15	1	40m2
	Toilet staf	3m2	4	3	6m2
	Janitor	4m2	4	1	4m2
Total					145m2

Table 2.16 Besaran ruang administrasi

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

No	General	Besaran
1	Housing Units	1873m2
2	Blok Fasilitas	4340m2
3	Blok Service	206m2
4	Pengunjung Narapindana	263m2
5	Perpustakaan	82.5m2
6	Workshop	96,5m2
7	Healthcare Facilities	917,5m2
8	Area dapur	230m2
9	Area makan komunal	663m2
10	Ruang Ibadah	640m2
11	Keamanan	115m2
12	Fasilitas staf	200m2
13	Administrasi	145m2
Total		9271.5m2

Table 2.17 Total besaran ruang

Sumber: Technical guidance PrisonPlanning, United Nations OPS

Luas Total besaran ruang yakni 13.678m2 dengan KDB 70% dari total luas lahan sebesar 9500m2 maka lahan dasar yang dapat terbangun yakni sebesar 6650m2. Maka sisa ruang sebesar 7026m2 dapat dibangun secara vertical

mengeahui bahwa KLB bangunan yakni 1,5 yang mana total luas lantai yang dapat dibangun pada site yakni 14.250m2

2.3 Persyaratan terkait Aktivitas & Ruang

Persyaratan *housing units*

- Utuk sel tinggal Jarak antar dinding minimal 2.15m dengan ketinggian minimal 2.45m Untuk sel bersama ketinggian minimal 3m (menggunakan double mattres)
- Untuk ruang *housing* yang digunakan bersama memiliki performa yang lebih baik dibanding *housing* yang hanya dihuni oleh narapidana tunggal. Hal ini karena narapidana memiliki seseorang yang dapat dia percaya yang juga memberika atmosfer lebih baik di dalam penjara.
- Di dalam blok *housing* terdapat penjaga yang memantau dan menghitung jumlah tahanan yang keluar masuk area.
- *Housing* hanya boleh ditempati minimal 10 jam per hari untuk memaksimalkan sosialisasi narapidana dengan sekitar.
- Bukaan yang terdapat pada *housing* minimal harus sebesar 4% dari luasan lantai yang digunakan sebagai sel *housing*.

Persyaratan blok fasilitas

- Area yang dinaungi oleh *shading* jika diterapkan pada daerah yang memiliki iklim panas dan basah.
- Kebutuhan akan ruang *external* yang terbuka untuk memudahkan sipir mengawasi dan mengotrol tatanan narapidana
- Fasilitas *outdoor* dirancang untuk memberikan stimulus pada narapidana, fasilitas ini terdiri dari area duduk, bermain, dan berkegiatan olahraga, juga sekaligus menciptakan *softer environment* dan memberikan narapidana interaksi dengan alam.
- Fasilitas toilet minimum 1 buah untuk minimal 25 narapidana, Fasilitas mandi minimal 1 buah untuk 50 narapidana
- Menciptakan keamanan *dynamic* dengan menciptakan lingkungan yang tidak mengurangi interaksi antara staff dengan narapidana.

Pengunjung Narapidana

- Mempertahankan privasi narpidana namun juga memberikan staff kontrol dalam memantau narapidana
- Pengunjung narapidana memiliki sirkulasinya sendiri untuk meminimalkan kontak dengan penjara dan narapidana lainnya.
- Ruang pengunjung diharuskan terbuka, dengan standar tanpa pilar untuk mempermudah pengawasan dari staff
- Cahaya terang dan kondisi ruangan yang diberi warna cerah agar tidak mengintimidasi pengunjung yang datang.

Edukasi

- Sisitem edukasi yang berada di dalam penjara dapat berupa edukai yang berjalan sesuai dengan kurikulum yang ada, ataupun dapat memberikan pengajaran berupa sebuah norma norma yang berada pada masyarakat.
- Ruang kelas sendiri dapat terdiri dari kelompok kecil yang teridiri dari 5-6 orang ataupun dapat terdiri dari kelompok besar sejumlah 20 orang

Area makan komunal

- Aliran sirkulasi yang perlu di perhatikan agar tidak terjadi campur nya narapidana koruptor dengan narapidana dari extensi rutan 1 medaeng.
- Perletakan dapur jika bersebelahan dengan area makan komunal maka perlu diberikan pintu tambahan untuk mengantisipasi terjadinya narapidana yang menerobos masuk kedalam dapur

2.4 Kajian Tapak dan Lingkungan

2.4.1 Pemilihan Tapak

Gambar 2.6 Lokasi Rumah Tahanan Medaeng

Source: Google map

Pemilihan lahan untuk konsep rancangan berlokasi di daerah medaeng, yang mana merupakan daerah perbatasan antara Surabaya dengan Sidorajo. Lokasi ini berada cukup jauh dari pusat kota Surabaya maupun pusat kota Sidoarjo yang menjadikan rutan ini cukup terisolasi dari kegiatan pusat kota. Setelah ditelusuri lebih lanjut didapati data bahwa rutan kelas 1A Surabaya ini merupakan salah satu dari rutan yang memiliki jumlah tahanan melebihi dari kapasitas penjara sendiri tersebut. Over populasi dari penjara ini sendiri terjadi karena banyak dari tahanan yang menjalani *overstay*. *Overstay* merupakan istilah yang terjadi ketika tahanan tidak segera meninggalkan lapas meskipun masa tahanan nya telah usai, yang mana terjadi karena keterlambatan menerima salinan putusan pengadilan. Rutan kelas 1A Surabaya di Medaeng dihuni lebih dari 3 ribu narapidana. Jumlah ini 6 kali lipat lebih banyak dari kapasitas Rutan yang hanya 500 napi.

Meskipun lokasi penjara ini terbilang cukup jauh dari pusat kota yang menjadikan situasi dari penjara ini cukup terisolasi, penjara ini cukup berdekatan dengan lokasi terminal Purabaya Surabaya yang menjadikan hukuman sosiologis bagi pelaku tahanan dapat diterapkan pada rutan ini.

2.4.2 Kajian Tapak dan Lingkungan Pada Kawasan Medaeng

- **Pergerakan Cahaya**

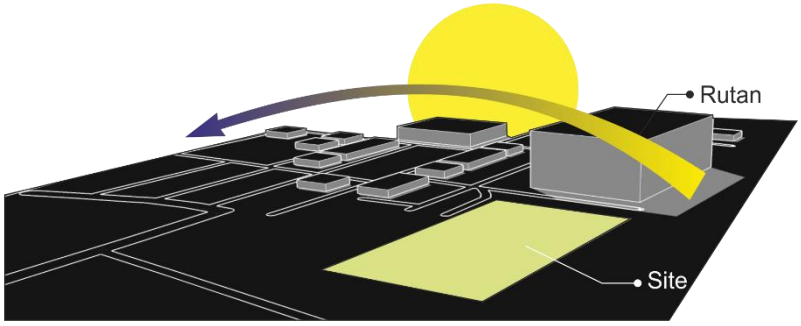

Gambar 2.7 Pergerakan matahari pada kawasan rutan

Sumber: Dokumen Pribadi

Dalam konteks penjara yang manusiawi, perlu disertakan pencahayaan dan kondisi ruang yang cukup memadai bagi tahanan. Lokasi site menghadap ke arah Barat yang menjadikan bangunan yang akan menjadi extensi dari rutan, idealnya menghadap ke arah selatan atau utara. Memperhitungkan heat gain pada arah barat dan timur yang cukup tinggi, Baik di siang maupun sore hari. Opsi desain lain yang dapat diaplikasikan yakni penggunaan double skin mapupun teduhan alami dari vegetasi yang berukuran tinggi.

- **Aktivitas manusia**

Gambar2.8 Aktivitas manusia di sekitar site

Sumber: dokumen Pribadi

Kegiatan manusia di luar bangunan rusun cukup padat dengan hadirnya pujasera yang berada di seberang jalan. Juga sirkulasi manusia padat sepanjang penerimaan tamu hingga area parkir mobil berakhir (garis kuning). Mengindikasikan kebutuhan akses pejalan kaki yang memadai menuju ke bangunan. Untuk sirkulasi kendaraan (garis merah) tergolong ramai lancar dengan tidak adanya aktifitas lain pada jalan kecuali untuk mengunjungi rutan. Area parkir pada konteks site dibiarkan berada di pinggir jalan saja, membuat keluar masuk kendaraan terutama mobil cukup sulit di saat yang bersamaan. Dibutuhkan sebuah parkiran yang dapat mengakomodasi bangunan existing dan bangunan baru di sebelahnya. (garis biru) Mengindikasi konektifitas antar bangunan. Melihat konteks penjara yang cukup berbeda, dengan penjara lama sebagai penjara umum dan penjara extensi sebagai penjara kusus koruptor menjadikan koneksi bangunan tidak harus langsung. Koneksi yang mungkin akan timbul adalah koneksi kebutuhan ruang seperti service, area terbuka dan beberapa sel bagi tahanan.

- **Luasan dan Kondisi Lahan**

Gambar2.9 Lahan yang akan digunakan sebagai extensi rutan.

Sumber:dokumen pribadi

Luas total lahan yakni 9500m2 dengan panjang lahan 110m x 85m luasan lahan dapat dimanfaatkan sebagai RTH. RTH sangat membantu tahaan dalam memperbaiki kesehatan mental, dengan keterbukaan dan vegetasi memberikan suasana tenang dan tidak

tertutup. Lahan sendiri merupakan bekas sebuah bangunan yang tidak terpakai. Tertutupi dengan vegetasi liar. Rencana pembangunan di lahan tersebut adalah sebagai lahan parkir kendaraan.

- **Kajian Elemen Sekitar Lahan**

Gambar2.10 Keadaan belakang lahan

Sumber: dokumen pribadi

Tepat di belakang lahan terdapat vegetasi sebagai pembatas pemukiman dengan jalan tol. Lengkap dengan sanitasi di sepanjang jalan. Juga lahan terkoneksi dengan gardu listrik utama yang mempermudah akses utilitas listrik. Juga elemen bangunan di sekitar lahan merupakan bangunan perumahan warga dengan ketinggian tidak lebih dari 10 meter. Dengan ketidakhadiran bangunan tinggi di sekitar lahan view dari lahan dapat dimaksimalkan. Memberikan bangunan sebuah system therapeutic yang tidak membebani mental dari tahanan.

2.4.2 Analisa Tapak Melalui SWOT

	Fact/Data	Analysis	Synthesis
Lahan	• Berada di tengah area industri dan militer • Lahan merupakan bekas bangunan yang tidak terpakai	S – Dekat dengan area militer dan industri menjadikan area sangat aman O – Lahan yang sebelumnya merupakan *residual space* dapat memiliki fungsi baru W– Lahan cukup sulit untuk di capai	S – Memberi proteksi tambahan O – Meningkatkan value lahan W– Memberikan enterance yang terfokus
Aktivitas	Kegiatan aktivitas ramai pada siang hari	O – Menghindari jam kunjung pada siang hari guna meminimalisir keramaian di siang hari.	O – jam kunjung di pagi hari
Sirkulasi	• Sirkulasi pejalan kaki minim • Sirkulasi kendaraan yang cukup sempit	W– Manufer dari kendaraan cukup sulit untuk berputar balik T– Memicu terjadinya *chaos* antar pejalan kaki dan kendaraan	W– memberi manufer luas dalam bangunan T– menyediakan akses pejalan kaki
Vegetasi	Didominasi oleh tanaman ukuran sedang	W– Terletak di beberapa spot lokasi yang tersebar	W– memberi vegetasi lebih pada area sekitar
Utilitas	Saluran air dapat dikoneksi langsung menuju kali.	T– Dapat terjadi banjir O– Memudahkan saluran utilitas air	T– menaikkan ketinggian bangunan O– Saluran air terfiltrasi

Table 2.18 Tabel SWOT Tapak

Sumber: Dokumen Pribadi

2.5 Kajian Peraturan dan Data Terkait

Berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo no 6 tahun 2009 yang mengatur tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 -2029 (RTRW) Sidoarjo menyatakan bahwa SSWP I meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Waru. SSWP I dengan pusat di Kawasan Waru dan fungsi utama permukiman, industri dan perdagangan, dikembangkan fasilitas transportasi, mall,bandar udara dan fasilitas pendukung lainnya untuk skala lokal, regional, dan internasional. Yang mana SSWP sendiri memiliki arti Sub Satuan Wilayah Pengembangan, yakni kesatuan ruang yang mempunyai spesifikasi fisik, sosial, ekonomi serta memerlukan manajemen penyelenggaraan pembangunan tertentu untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan laju pertumbuhan wilayah yang berhasilguna dan berdayaguna. Lahan terletak di kawasan militer daerah Sidoarjo.

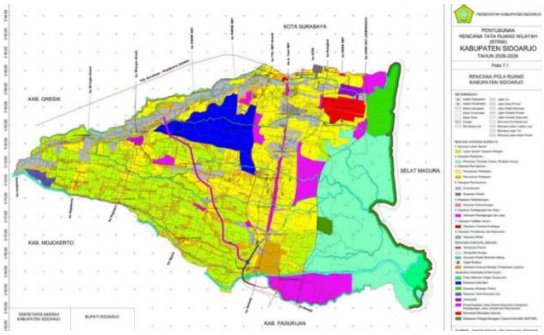

Gambar 2.11 Peta peruntukan Sidoarjo

Sumber: RTRW Kabupaten Sidoarjo

Dengan penjelasan diatas dapat diambil makna bahwa pembangunan fasilitas umum yang bersifat lokal dalam konteks yakni penjara dapat di bangun di kawasan Waru. Adapaun berupa pada peraturan Ruang Tata Ruang Wilayah Sidoarjo menyebutkan bahwa sarana tersebut memiliki peraturan yang harus ditaati untuk proses perancangan bangunan kedepannya, meliputi:

GSB (Garis Sempadan Bangunan) minimal 15 meter. GSB ini berfungsi untuk menyediakan lahan sebagai daerah hijau dan resapan air

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum sebesar 70%. KDB sendiri adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan terhadap luas lahan, sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimum sebesar 1,4. KLB merupakan perbandingan antara luas total bangunan dibandingkan dengan luas lahan.

KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimal 10%. KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan .

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3

PENDEKATAN DAN METODA DESAIN

3.1. Alur Berfikir

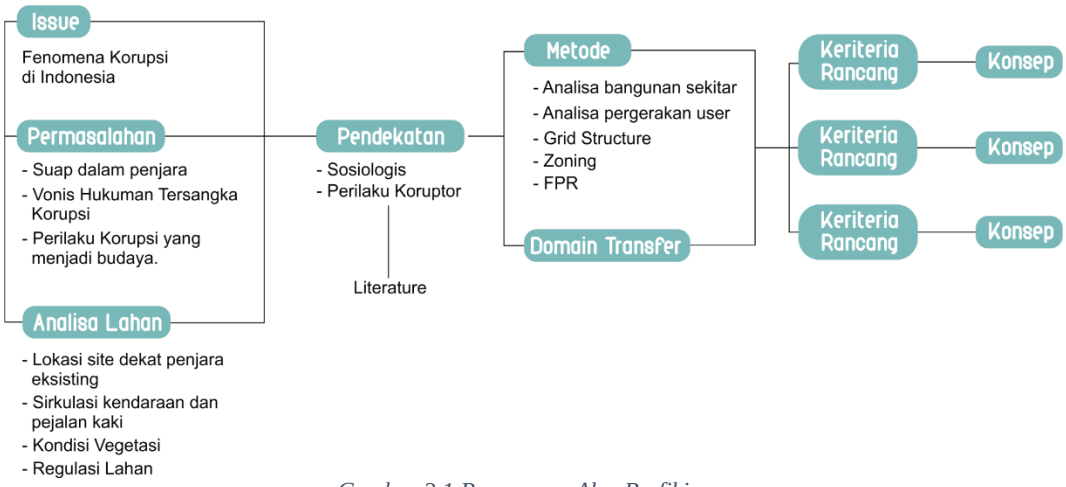

Gambar 3.1 Rancangan Alur Berfikir

Sumber: Dokumen Pribadi

Dalam Proses alur berfikir penggunaan framework dari Donna Duerk diterapkan guna mempermudah dalam klasifikasi proses desain.

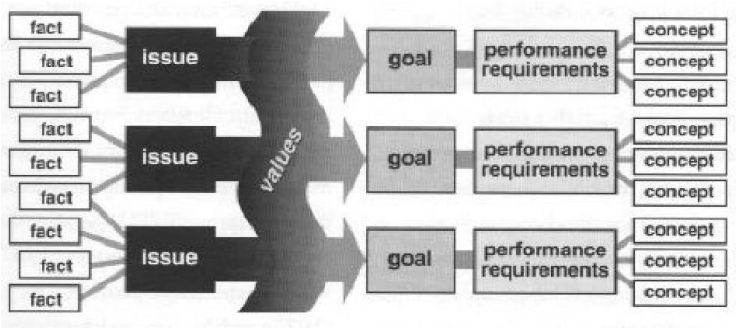

Gambar 3.2 Diagram Metode Architecture Programming
Sumber: Duerk, Donna P. 1993

Issue dan permasalahan tapak yang sebelum nya sudah ditarik kedalam beberapa PR kemudian akan ditransfer lagi kedalam konsep desain yang mana dapat langsung di implementasikan ke dalam desain.

3.2 Pendekatan dan Metode Rancang

3.2.1 Pendekatan Prilaku

Pendekatan prilaku yang digunakan dalam mengkaji desain adalah pendekatan perilaku secara sosiologis. Arsitektur sosiologi didefinisikan sebagai pengaplikasian dari sebuah teori sosial yang ditransfer kedalam desain proses dari arsitektur. Memberikan sebuah kuantitas (*tools*) untuk mengantisipasi bagaiamana desain memiliki impact kepada masyarakat di berbagai level.

Penerapan perilaku sosiologis ini akan diterapkan kepada tahanan koruptor. Bagaimana nantinya pelaku koruptor diletakkan pada kondisi sosial masyarakat. Menciptakan sebuah koneksi sosial antar masyarakat dengan koruptor. Bangunan natinya akan memiliki makna dimata sosial akan sebuah status yang berbeda dari pelaku korupsi.

Selain pendekatan sosiologis yang dapat diterapkan kepada koruptor, juga dapat diterapkan pendekatan *behavior setting* pada bangunan. *Behavior setting* sendiri merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan tentang hubungan tempat dan aktivitas dari manusia. Bangunan akan memberi kontrol akan tatanan aktivitas tahanan dalam event waktu tertentu.

Kontrol aktivitas pada pelaku koruptor ini sendiri dinilai sangat penting mengingat bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh koruptor sendiri di dalam penjara. Kontrol aktivitas ini berfungsi menekan kekuasaan tersebut. Penyelesaian nya dapat dicapai dari perletakan ruang, dan alur sirkulasi serta pemilihan material yang sesauai dengan konteks. Juga menilai sebuah ruang yang “mengekang” namun masih sesuai dengan standarisasi manusia diamana tahanan dapat mekakukan aktivitas dengan leluasa.

3.2.2 Metode Rancang

- Analisa Bangunan Sekitar

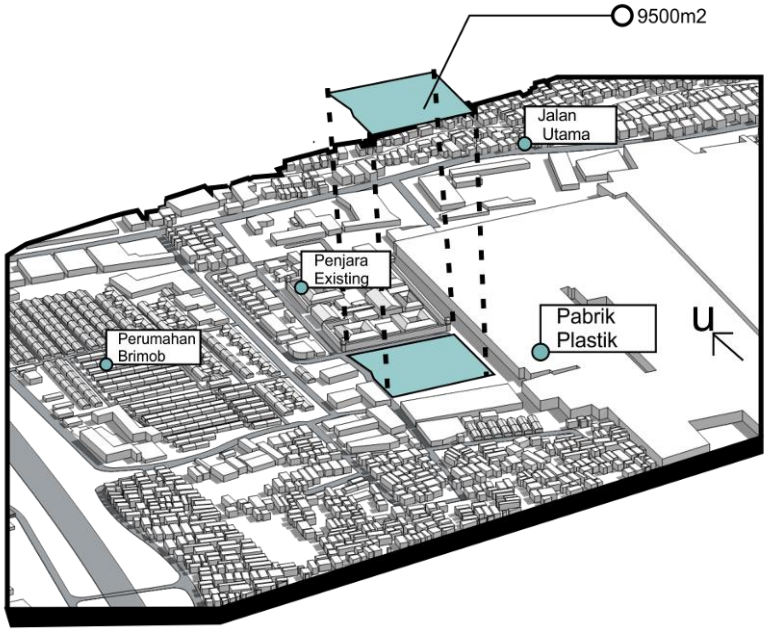

Gambar 3.3 Diagram Area Sekitar Lahan

Sumber: Dokumen Pribadi

Metode analisa bangunan sekitar berfungsi untuk menentukan arah bangunan dan bukan, memaksimalkan bukan sehingga narapidana juga tetap dapat merasakan bangunan keadaan sekitar.

- Analisa Pergerakan User

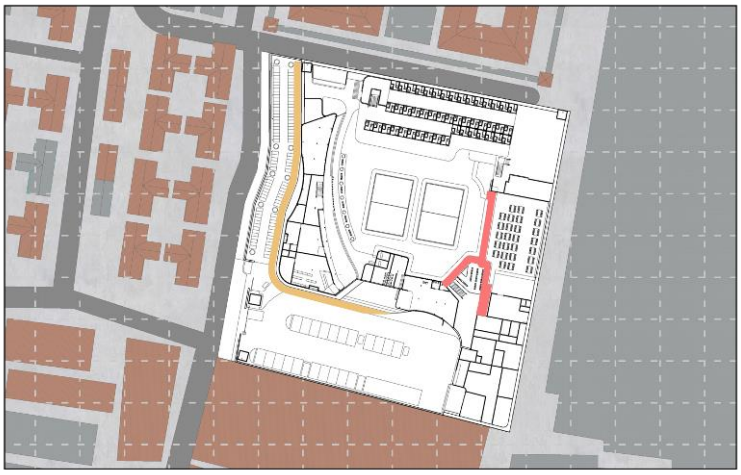

Gambar 3.4 Diagram Sirkulasi Pengunjung dan Narapidana

Sumber: Dokumen Pribadi

Dengan menganaslisa pergerakan user, desain dapat memberikan batasan pasti dimana sirkulasi pengunjung, dan narapidana sehingga mengantispasi terjadinya tabrakan antar sirkulasi pengunjung dan sirkulasi narapidana. Analisa pergerakan user juga dapat memaksimalkan keamanan dan mencegah terjadinya penyelundupan barang kedalam lokasi penjara.

- *Grid Structure*

Gambar 3.5 Diagram Grid Structure

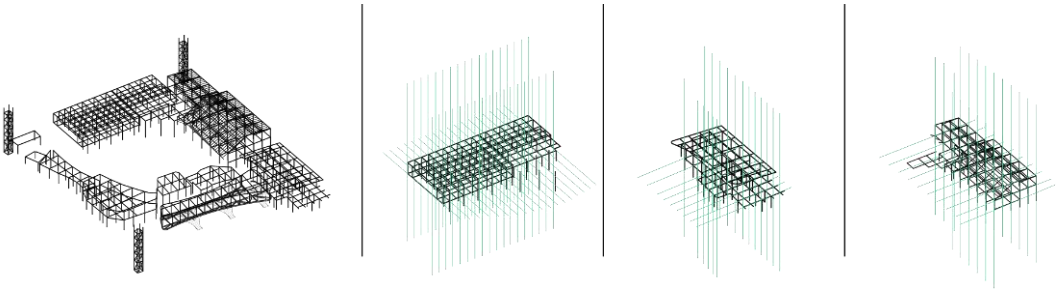

Sumber: Dokumen Pribadi

Penerapan metode *grid structure* mempermudah dalam mendistribusikan beban bangunan. Serta memudahkan perletakan modul housing dari tahanan baik narapidana koruptor maupun narapidana non koruptor.

- Zonasi Massa Bangunan

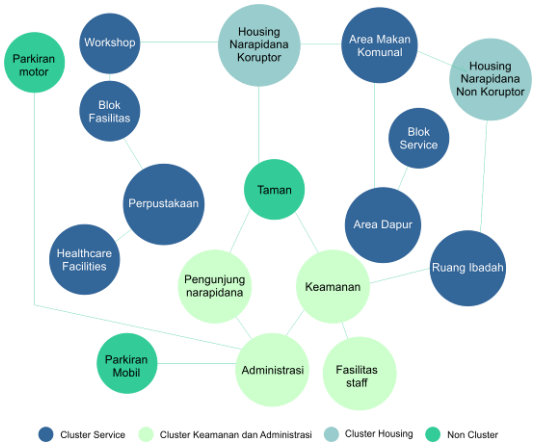

Gambar 3.6 Diagram Zonasi bangunan

Sumber: Dokumen Pribadi

Metode zonasi bangunan disesuaikan dengan cluster dari tiap fungsi ruang, hal ini bertujuan guna mempermudah control akan sirkulasi narapidana dan pengunjung.

3.2.3 Form Finding

Metode metode desain diatas kemudian digunakan dalam merancang desain bangunan dan menemukan bentuk dasar bangunan yang kemudian akan lebih di detailkan sesuai konsep yang diterapkan

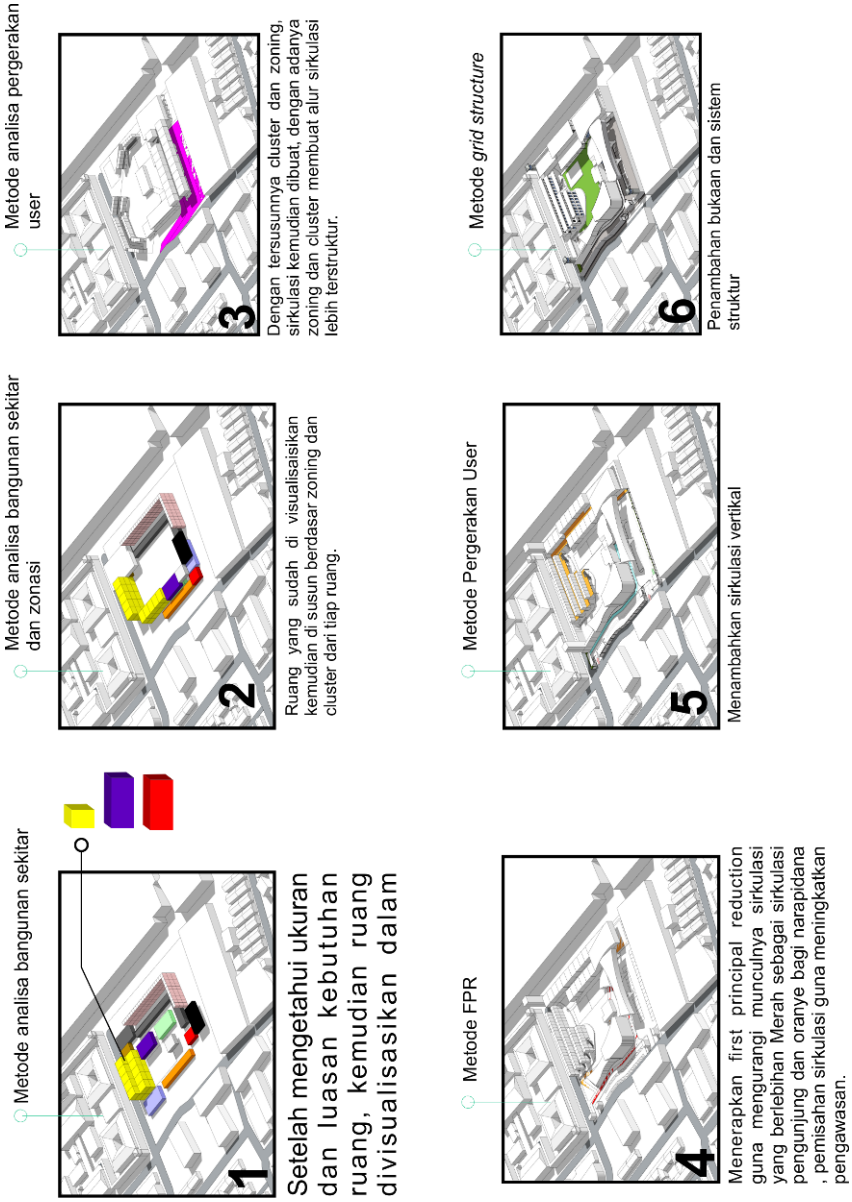

Gambar 3.7 Diagram Form Finding

Sumber: Dokumen Pribadi

3.3 Kajian Teori Pendukung

3.3.1 Pendekatan Sosiologi

Definisi sosiologi sendiri yakni merupakan ilmu sosial yang mempelajari proses dan pola interaksi individu dan kelompok manusia, bentuk-bentuk organisasi kelompok sosial, hubungan didalam kelompok sosial tersebut, dan pengaruh kelompok sosial pada perilaku individu, dan sebaliknya , dan interaksi antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya (Team of Experts, 2000).

Selain definisi etimologis dari istilah sosiologi, sosologi juga memiliki definisi substantif lainnya. Dengan demikian, sosiologi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari jenis-jenis fenomena seperti:

- Struktur dan fungsi masyarakat sebagai suatu sistem;
- Sifat, kompleksitas dan isi perilaku sosial manusia;
- Dasar-dasar kehidupan sosial manusia;
- Interaksi manusia dengan lingkungan luarnya;
- Ketidakpastian interaksi sosial untuk pengembangan manusia;
- Bagaimana dunia sosial mempengaruhi kita, dll.

Penerpan kajian sosiologi di bidang arsitektural khusnya pada penjara koruptor yang meberikan efek jera, namun juga mengantisipasi akan terjadinya kasus korupsi di masyarakat kedepannya. Bagaimana interaksi sosial tersebut terjadi dalam sebuah pejara? Interaksi dimana warga dapat memandang langsung kegiatan yang terjadi di dalam penjara, agar mengerti dampak konkret yang terjadi jika melakukan tindak pidana korupsi.

3.3.2 Pendekatan *Behaviour Setting*

Behaviour setting dapat didefinisikan sebagai system sosial dengan sekala kecil yang memiliki komposisi dari manusia dan benda fisikal, yang dikonfigurasikan dengan sedemikian rupa untuk mencapai suatu program kegiatan dalam batas waktu yang di tentukan dan dengan batasan tempat (Fuhrer,

1990). Sebuah program dimana diurutkan berdasarkan *sequence* waktu akan terjadinya interaksi manusia dengan lingkungan, yang mengarah kepada kegiatan teratur dan fungsi esensial lingkungan. Dari definisi yang telah dijelaskan tersebut, sudah terurai dua properti dapat di indentifikasi yakni; structural dan dinamik. Secara stuktural *behavior setting* terdiri dari satu *pattern behaviour* dengan lingkungannya atau lebih. Secara dinamis, bagian dari hubungan antara perilaku-lingkungan di dalam *behavior setting* memiliki tingkat saling ketergantungan antar satu sama lainnya, bahkan lebih besar daripada ketergantungan antara bagian-bagian dari *behavior setting* lainnya (Schoggen, 1989).

Tujuan dari pendekatan *behavior setting* ini sendiri yakni untuk menciptakan suatu *built environtment* untuk mewadahi *affordance* yang ingin dicapai. *Affordance* yakni bagaimana cara user meng-interpretasikan suatu objek Roger Baker (1969) dan Jon Lang (1987) meyatakan bahwa *behaviour setting* teridiri dari.

- Aktivitas yang berulang (*standing pattern of activity)*
- Lingkungan, yakni mengenai situasi dan layout dari lingkungan tersebut.
- *Synomorphy* relasi yang harmoni antar aktivitas dan lingkungan
- Waktu yang spesifik.

Seperti yang suah dijelaskan bahwa *behavior setting* memiliki struktur internalnya sendiri. Jika individu yang berada dalam sebuah set lingkungan berbeda, maka berbeda pula *behavior setting* yang timbul. Karena struktur *behavior setting* dibedakan dari siapa yang mengontrolnya (*performance zone*). Batas dari sebuah *behavior setting* ini adalah dimana akivitas yang sedang berlangsung ini berakir, sebagai contoh ruang kelas yang memiliki konsep terbuka, pemisah dari aktivitas yang terjadi di dalam ruangan yakni lebih mengarah kepada sense suara. Adapun *built environtment* yang biasa dapat kita temui *behavior setting* yakni.

- *Place* dimana aktivitas yang berulang berlangsung.

- *Links* yakni sebuah area yang mana memiliki tujuan untuk menghubugkan *places.*

Penerapan dalam konteks lahan disini adalah bagaimana narapidana nantinya dapat melakukan aktivitas rutin sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mengontrol serta memantau kegiatan dari narapidana. Karea narapidana koruptor memiliki sifat yang tamak dan berkelakuan seenaknya. Pemisah fungsi ruang yang lebih diperjelas dan *link* juga didesain lebih terbuka agar mempermudah pengawasan. Penyelesaian desain nantinya akan berdasar berdasar dari *pattern* prilaku manusia yang terjadi. Jika dimana halnya terjadi perlakuan suap dalam tahanan adalah di area yang gelap dan sepi, maka dari segi dsain dapat meminimalisir adanya ruangan yang dapat memicu terjadinya aksi suap.

3.3.3 Teori Mengenai Hukuman Dengan Rasa Malu

Nitibaskara (2007) sebagai *expert* dalam budaya hukum di Indonesia menyatakan bahwa, ancaman hukuman keras yang diterapkan kepada hukum korupsi bukan merupakan cara utama untuk mencegah timbulnya korupsi di Indonesia. Sehingga memunculkan kebutuhan akan bagaimana cara yang efektif untuk menghukum pelaku korupsi. Salah satu teori yang muncul yakni menghukum pelaku melalui budaya hukum (*legal culture).* Budaya hukum sendiri menurut Lawrance M.Friedman (1975) merupakan sebuah *force* sosial yang konstan, namun tidak langsung diterapkan pada sistem hukum yang berjalan. *Culture* mengenai hukum ini mengarah kepada bagian dari budaya umum yang dapat menjadi sebuah kebiasaan, opini, dan cara berpikir serta sebuah *act* yang menentukan kekuatan sosial untuk lebih mengarah atau menjauh dari hukum. Raharjo (1980) menyatakan sebuah opini, yang mana budaya hukum dapat menjadi sebuah dasar untuk penerapan hukum yang positif bagi masyarakat. Ide untuk menerapkan hukuman “malu” ini berangkat dari cara pandang akan budaya hukum yang mana *force* sosial secara bertahap bekerja menjadi hukum itu sendiri. *Social forces* ini dapat membuat sebuah perubahan

pada hukum, *social forces* juga dapat menentukan hukum mana yang dapat diterapkan, sehingga *social forces* sangat kuat mempengaruhi kinerja dari hukum.

Nitibakara juga menyatakan bahwa tingkat korupsi yang masih tinggi ini dikarenakan sangsi kriminal yang diberikan oleh pengadilan terkesan tidak serius. Formulasi sangsi yang diterapkan pada hukuman korupsi juga tidak ditakuti ataupun menimbulkan efek jera. Nitibaskara (2009) menambahkan "jika ancaman hukuman bagi kriminal tidak cukup menakutkan, maka diperlukan sebuah review akan ketentuan hukum yang melawan korupsi. Namun, secara lebih luas, kita harus memeriksa realitas sosial masyarakat Indonesia ".

Sehingga sebuah hukuman yang tepat untuk diberikan kepada pelaku korupsi juga wajib memperhatikan realitas sosial dimana warga

yang memberikan sebuah keputusan atau bentuk baru sebuah hukuman kepada pelaku koruptor.

Sebuah ide hukuman yang dapat diterapkan dalam konteks budaya hukum diatas dicetuskan oleh Kahan dan Posner (1999), "Mempermalukan dapat didefinisikan sebagai proses di mana warga secara publik, dan secara sadar menarik perhatian pada disposisi atau tindakan buruk dari pelaku, sebagai cara menghukumnya karena memiliki disposisi atau terlibat dalam tindakan itu ". Malu adalah alat yang ampuh untuk memastikan kepatuhan normatif dan merupakan komponen sentral dalam teori keadilan restoratif dan kontrol informal. Namun, mempermalukan masih kurang dimanfaatkan dalam sistem peradilan pidana dan oleh masyarakat yang berupaya melakukan kontrol sosial informal.

Konsep mempermalukan memiliki manfaat lebih bagi masyarakat, daripada penerapan perampasan kebebasan dalam suatu institusi dengan kurun waktu lama atau bahkan hukuman mati. Oleh karena itu, bagi (Braithwaite, 1989), rasa malu dapat berfungsi sebagai hukuman yang efektif bagi para penjahat dan alat untuk rehabilitasi bagi para pelanggar.

Goldman juga menambahkan sebuah argumen yang mendukung hukuman memalukan publik:

(1)Hukuman mempermalukan dihadapan publik dapat mengurangi biaya, karena pemanfaatan sumber daya manusia (koruptor) diberi hukuman untuk melayani masyarakat, seperti membersihkan gorong gorong, memotong rumput, dan sebagainya.

(2) Mempermalukan di depan umum mencegah indoktrinasi ke dalam budaya kriminal. Hukuman ini dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menjaga tingkat kejahatan ditengah masyarakat.

(3) Hukuman mempermalukan di depan umum mengungkapkan kecaman moral yang sesuai. Sanksi mempermalukan di depan umum dapat menjadi alternatif yang efektif untuk hukuman penjara karena hukuman tersebut menyatakan kecaman moral yang sesuai

(4) Hukuman yang mempermalukan di depan umum secara akurat mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Karena mereka merampas privasi individu, yang sangat dihargai di masyarakat saat ini, hukuman memalukan publik dapat didukung sebagai bentuk hukuman yang tepat.

Harus diakui pro dan kontra akan timbul, terkait dengan potensi pengurangan masalah hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan gagasan “kinerja sosial” dalam memberikan hukuman kepada pelaku korupsi sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak asasi manusia yang korup sebagai upaya untuk "membalas" perbuatan tersebut, tetapi jika diniali dari segi moral , kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan yang sangat kejam serta melukai keadilan masyarakat. Hukuman pidana dalam bentuk hukuman mempermalukan pelaku koruptor ini justru untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat karena dampak yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.

3.3.4 Teori Mengenai Sifat Koruptor

Dari segi model ekonomi London ada beberapa faktor yang dikuptip dari forbes, yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi dan berikut adalah penjelasan lengkapnya.

- Korupsi karena krisis

  Baik ekonomi perilaku dan penelitian psikologi sosial telah menunjukkan bahwa orang termotivasi lebih kuat untuk menghindari kerugian daripada mendapatkan *income*. Memang, kerugian dianggap lebih tidak menyenangkan daripada keuntungan yang dipandang menyenangkan; dan, sebagai akibatnya, kerugian tampak lebih besar daripada keuntungan. Karena alasan ini, adalah suatu kepentingan untuk memastikan bahwa kerugian dapat dihindari. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah mengambil lebih banyak risiko. Dengan kata lain, orang lebih termotivasi untuk terlibat dalam perilaku berisiko dalam hal ini (korupsi) untuk menghindari kerugian daripada mencapai perolehan. Dalam konteks krisis keuangan, perilaku berisiko untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri dengan cepat mengambil bentuk tindakan dan keputusan yang tidak etis.

  Penelitian perilaku lainnya menunjukkan bahwa krisis dicirikan oleh tingginya tingkat ketidakpercayaan. Akibatnya, harapan akan tindakan baik dari orang lain dilihat sangat rendah. Kepercayaan umumnya didefinisikan sebagai "keadaan psikologis yang terdiri dari niat untuk menerima kerentanan berdasarkan harapan positif dari niat atau perilaku orang lain". Dalam bentuk ekstrem, suatu krisis dapat menimbulkan keadaan ketidakpercayaan di mana para pihak menjadi saling membela satu sama lain dan informasi tidak dibagikan - atau bahkan disalahpahami untuk menjaga kepentingan mereka sendiri.

- *Self-service*

  Sehubungan dengan kerentanan psikologis, orang (dan bahkan organisasi secara keseluruhan) dengan mudah terlibat dalam sebuah

aksi yang berhubungan dengan melayani diri sendiri, di mana tindakan mereka sendiri selalu dinilai lebih bermoral dan adil daripada yang lainnya. Selain itu, mereka juga meremehkan dampak dari tindakan mereka dalam jangka panjang.

Jika ini masalahnya, maka upaya saat ini untuk merancang sistem pengaturan dan kontrol untuk membatasi perilaku tidak etis dan korup mungkin bukan langkah pertama yang harus diambil. Sistem kontrol tersebut memang memberikan insentif eksternal yang kuat untuk menampilkan perilaku yang benar dan moral; Namun, sulit untuk memastikan bahwa sistem ini secara intrinsik memotivasi orang untuk tidak terlibat dalam korupsi. Ketika sistem kontrol dihilangkan, bahaya selalu bahwa orang akan kembali ke kebiasaan buruk mereka.

Sifat yang telah dijabarkan di atas dapat dikembangkan menjadi beberapa konsep desain guna memperbaiki prilaku dari koruptor.

BAB 4

KONSEP DESAIN

Pada bab dibahas tentang beberapa konsep baik formal maupun konsep teknis yang diterapkan pada desain Rumah Tahanan Medaeng 2 napi koruptor

Konsep desain ini diperoleh dari hasil domain transfer metode dan SWOT yang kemdian dikembangkan menjadi konsep desain.

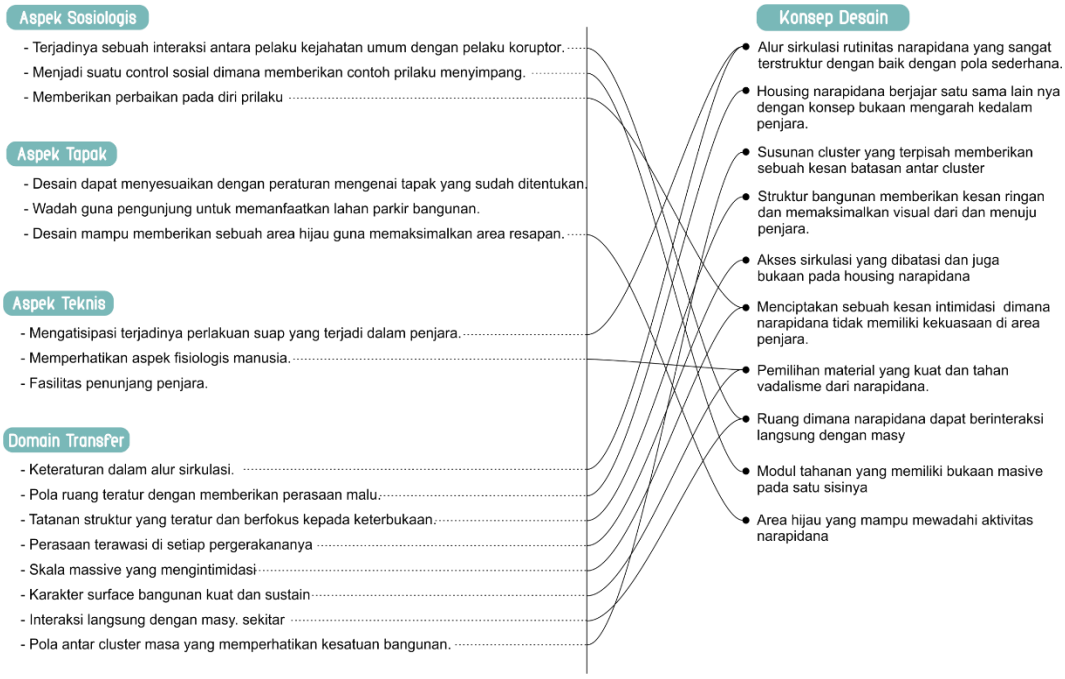

Gambar 4.1 Diagram konsep desain

Sumber: Dokumen Pribadi

4.1 Eksplorasi Formal

4.1.1 Konsep Hukuman Sosiologis Pada Modul Housing Narapidana Koruptor

Konsep modul menerapkan sebuah hukuman sosiologis yakni menerapkan feedback atau stimultan rasa bersalah dan malu akan perilaku korup yang narapidana telah lakukan.

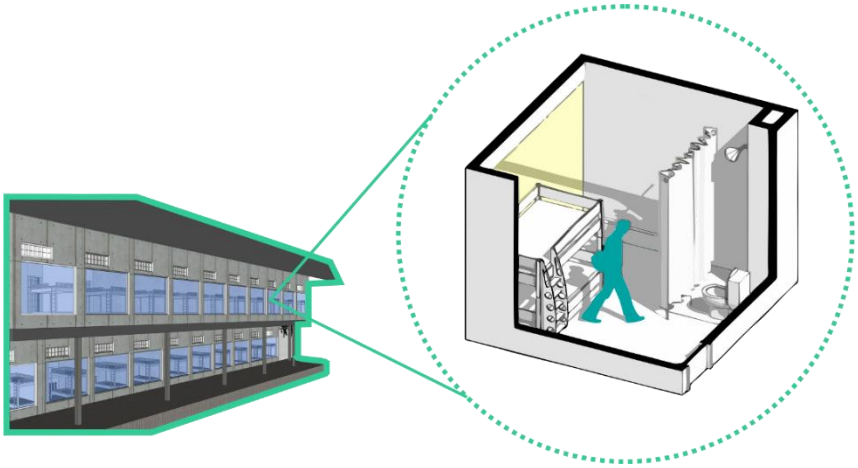

Gambar 4.2 Modul Sel Tahanan Korpuptor

Sumber: Dokumen Pribadi

Pada modul ini terdapat bukan kaca yang mengekspose kehidupan sehari hari narapidana koruptor. Sel napi yang terekspose ini nantinya dapat dilihat hanya bagi pengunjung yang datang ke penjara Medaeng 2 ini. Tempat dimana pengunjung dapat melihat langsung yakni berada pada massa di sebrang yang merupakan masa kantilever. Dinaikkan sekitar 7m dari permukaan tanah, agar view yang didapat menuju ke modul housing akan dapat terlihat jelas. Massa pengunjung ini merupakan tempat bagi pengunjung untuk menunggu giliran mereka menemui narapidana, selagi menunggu mereka dapat mengamati bagaimana kehidupan sehari hari yang dialami oleh napi koruptor di dalam sel mereka.

Gambar 4.3 Diagram View Dari Massa Pengunjung

Sumber: Dokumen Pribadi

Massa tahanan koruptor ini juga didesain berukuran kecil, yang memberikan kesan mengintimidasi dan mengekang, berbeda dengan modul tahanan non koruptor yang menerapkan konsep *dormitories*. Konsep *dormitories* ini memiliki keuntungan yakni dapat menampung lebih banyak jumlah tahanan dan juga meningkatkan konksi sosial antar napi.

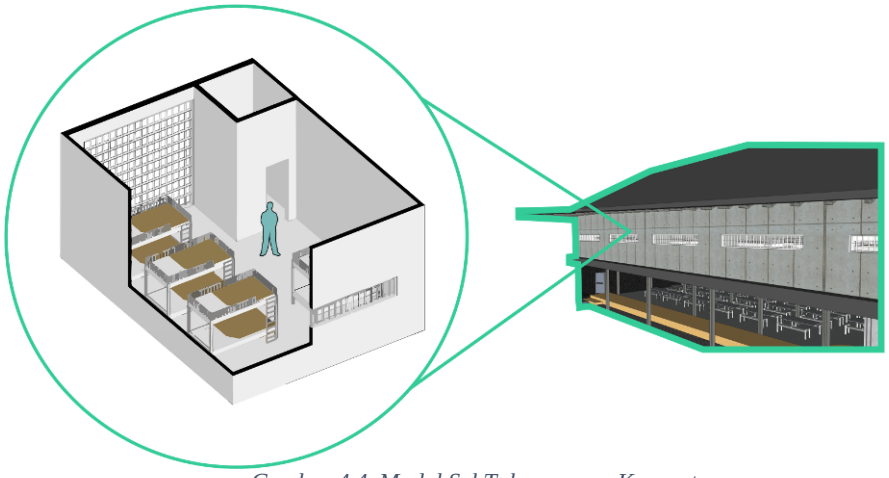

Gambar 4.4 Modul Sel Tahanan non Korpuptor

Sumber: Dokumen Pribadi

4.1.2 Konsep Alur Masuk Kendaraan Bermotor

Kebutuhan akan keamanan yang ketat dari penjara, mengingat penjara ini juga merupakan penjara yang dinaungi oleh negara, membuat alur masuk kendaraan bermotor memiliki penjagaan yang ekstra. Namun disaat yang bersaaman penggunaan biaya operasi bangunan tahanan yang harus seminimal mungkin guna menjaga sustainibilitas bangunan menjadikan penempatan pos dan orang yang berjaga dapat bebas.

Desain dari pos jaga ini pun kemudian dipikirkan agar dapat menjaga alur masuk baik motor dan mobil disaat yang bersamaan. Pintu masuk gerbang juga dilengkapi dengan pagar otomatis yang memberikan respon cepat jika terjadi rencana pelarian oleh narapidana

Gambar 4.5 Enterance Bangunan

Sumber: Dokumen Pribadi

4.1.3 Konsep Aktivitas Narapidana

Hal yang biasa terjadi pada tatanan penjara adalah, koruptor bebas melakukan apa saja yang mereka lakukan, karena mereka merasa paling diatas dan ekslusif hal ini lah yang menyebabkan kehidupan mereka dipenjara kadang tidak sesuai dengan ekspektasi warga yang menginginkan tuntutan seberat berat nya bagi para pidana koruptor.

Bukan hanya itu kasus suap yang terjadi didalam penjara mejadi sebuah indikasi adanya kecurangan yang terjadi didalam penjara. Aktivitas narapidana koruptor pun dipikirkan guna mengantisipasi terjadinya perilaku korupsi didalam penjara. Narapidana koruptor nantinya akan disatukan dalam berbagai aktivitas seperti makan, workshop, ibadah dan aktivitas lainnya dengan narapidana non koruptor. Hal ini dapat dinilai mengembalikan kembali sebuah moral dalam bersosialisasi.

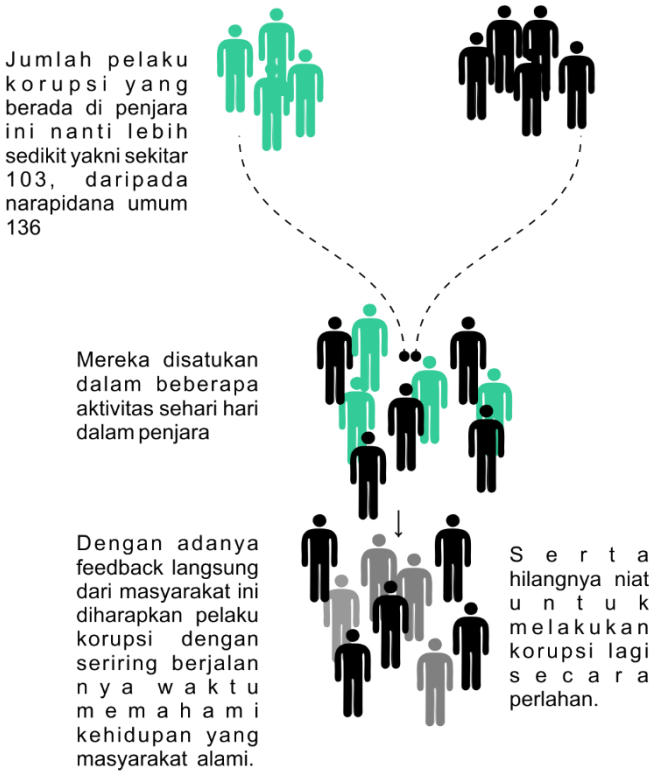

Gambar 4.6 Diagram Perubahan Perilaku Narapidana

Sumber: Dokumen Pribadi

Dasar sebuah perilaku sosial disini berjalan dimana group yang merupakan mayoritas akan memegang kendali dari sebuah tatanan masyarakat. Aktivitas yang dapat dilakukan bersamaan baik napi koruptor maupun napi non koruptor adalah aktivitas positif seperti olahraga, beribadah, makan, melakukan kegiatan di workshop dan membaca buku di perpustakaan.

Gambar 4.7 Diagram Aktivitas Bersama Narapidana

Sumber: Dokumen Pribadi

4.1.4 Konsep Vegetasi

Konsep vegetasi yakni tidak ada vegetasi besar didalam taman sehingga tidak menggangu aksessibititas view pada dalam penjara. Peletakan tanaman juga sangat minim pada dalam taman. Pemilihan tanaman juga wajib memiliki ketahanan yang kuat, yang memiliki kambium tebal sehingga dapat menahan terjadinya perusakan yang dilakukan oleh napi. Untuk daerah parkir dan sirkulasi kendaraan, tanaman yang digunakan yakni yang memiliki bentang luas dan memiliki ketinggian sedang hingga tinggi. Berikut adalah beberapa jenis tanaman yang dapat menjadi opsi; ketapang kencana, kiara payung dan asam jawa.

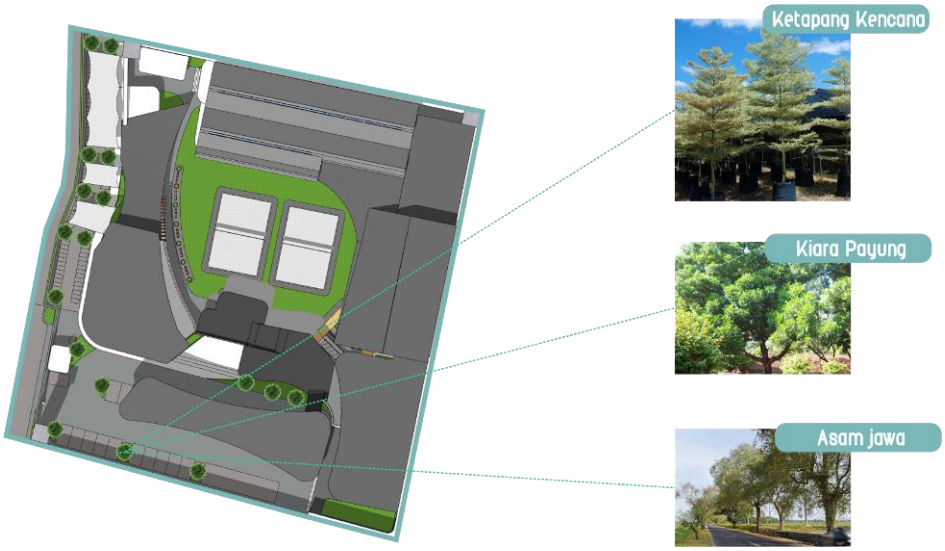

Gambar 4.8 Diagram Peletakan Vegetasi

Sumber: Dokumen Pribadi

4.2 Eksplorasi Teknis

4.2.1 Konsep Utilitas

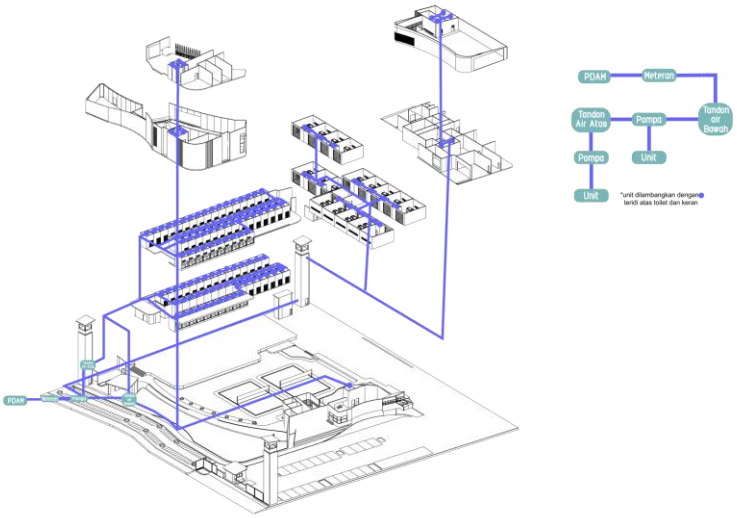

Gambar 4.9 Aksonometri Utilitas Air Bersih

Sumber: Dokumen Pribadi

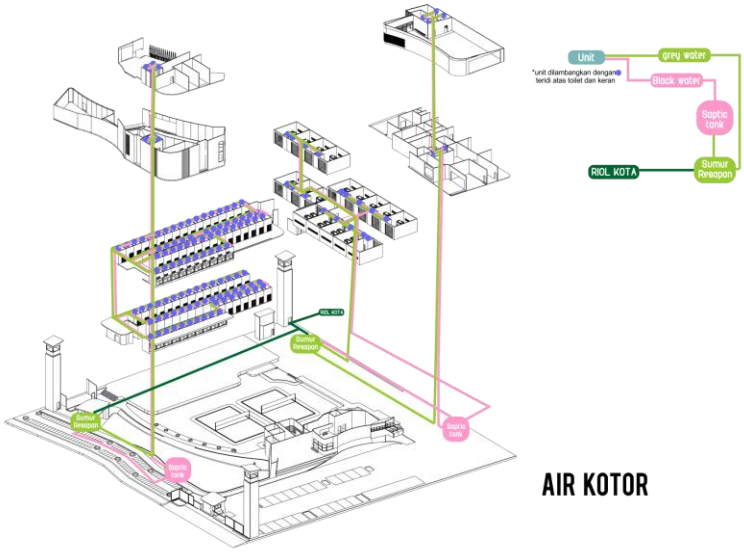

Gambar 4.10 Aksonometri Utilitas Air Kotor

Sumber: Dokumen Pribadi

Konsep utilitas air dengan penggunaan tendon atas yang diletakkan pada tower pengawas sehingga tower pengawas memiliki dua fugsi yakni sebagai menara pengawas dan sebagai tower air. Tower air atas ini nantinya akan digunakan saat genting atau saat pasokan air sedang menipis di musim kemarau. Air dipompa dari pdam menuju tendon air bawah atau dapat langsung dipompa menuju tendon air atas. Tandon air atas ini juga memiliki akses berupa tangga panjat guna melakukan pengecekan rutin.

4.2.2 Konsep Struktur

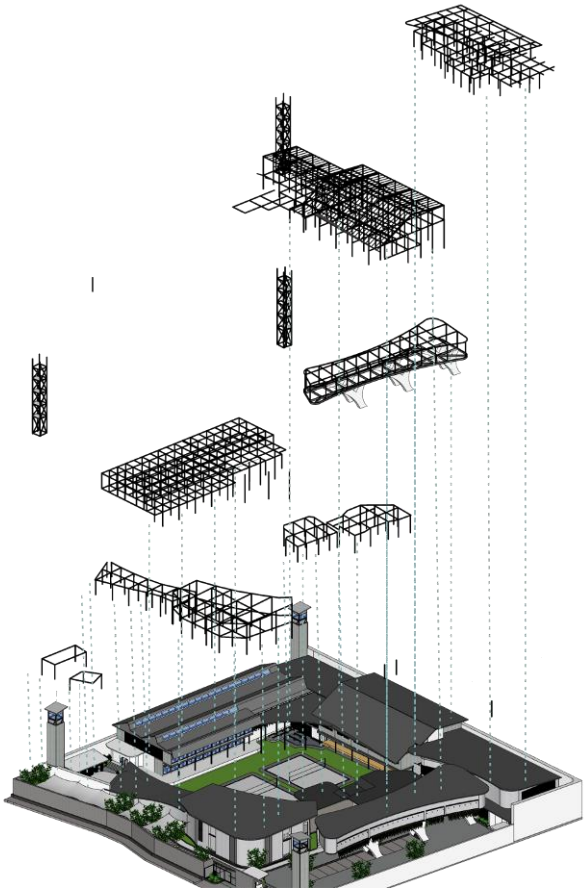

Gambar 4.11 Aksonometri Struktur

Sumber: Dokumen Pribadi

Pada struktur penggunaan balok dan kolom baja dengan ukuran 200x200 dipilih karena baja memiliki ketahanan yang kuat, mengingat kebiasaan buruk narapidana yang cederung merusak properti. Sehingga baja dan kolom baja ini pun tidak digunakan pelapis, dibiarkan apa adanya, juga sekaligus memberikan tema bangunan yang kuat dan kokoh.

4.2.3 Konsep Material

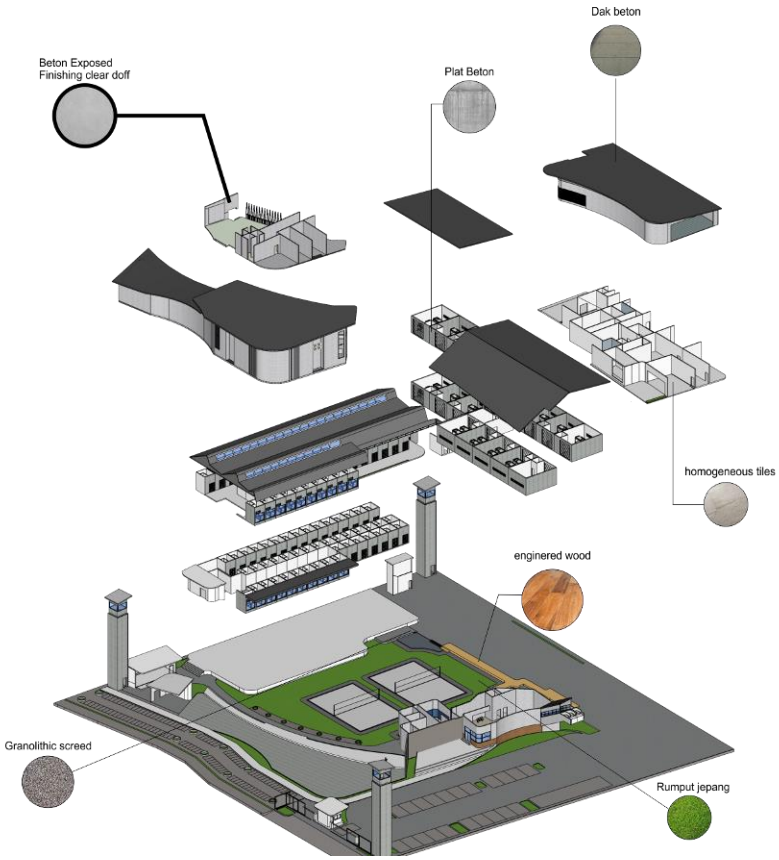

Gambar 4.12 Aksonometri Material

Sumber: Dokumen Pribadi

Penggunaan material beton sangat menonjol, dikarenakan ketahanan dari material beton akan vandalisme yang kerap kali dilakukan oleh narapidana selama dalam masa tahanan.

Penggunaan railing baja pun bermain peran dalam menciptakan sebuah batasan yang masih dapat memberikan akses visual kedalam ruang.

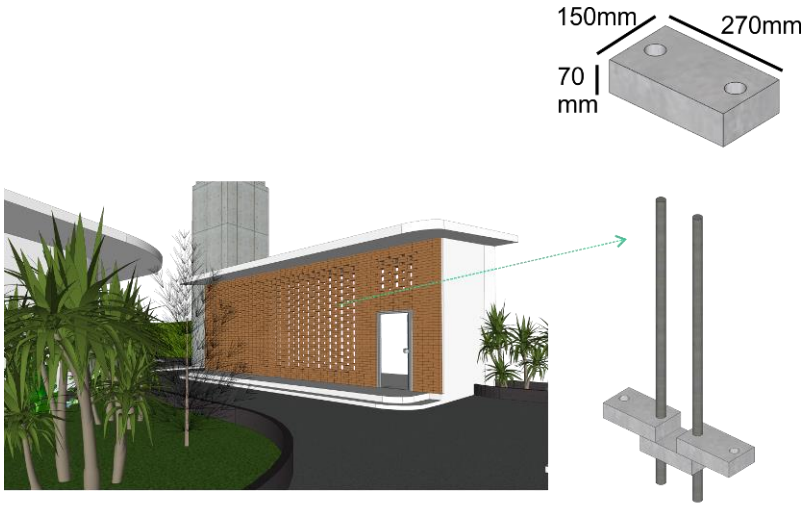

Gambar 4.13 Pemasangan Benton Precast

Sumber: Dokumen Pribadi

Salah satu cara yang ditempuh dalam mendesain sebuah penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi yakni dengan meningkatkan keterbukaan di sudut bangunan. Beton precast dipilih karena memiliki ketahanan yang kuat, dan juga disusun dengan rod baja yang memperkuat integrasi material. sehingga koneksi visual tetap hadir dan juga material lebih awet.

BAB 5

DESAIN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil perkembangan desain dari Rumah Tahanan Medaeng 2 yang dijabarkan melalui eksplorasi formal dan ekslporasi teknis yang mencakup gambar tampak, denah, potongan, perspektif, dan utilitas.

5.1 Eksplorasi Formal

Gambar 5.1 Bagian Enterance Bangunan

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.2 Tapak Bangunan

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.3 Area Istirahat Napi

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.4 Lapangan dan Area Jogging

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.5 Parkir Kendaraan Roda Dua

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.6 View dari massa pengunjnung

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.7 Area makan komunal

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.8 Ruang Narapidana Koruptor

Sumber: Dokumen Pribadi

5.2 Eksplorasi Teknis

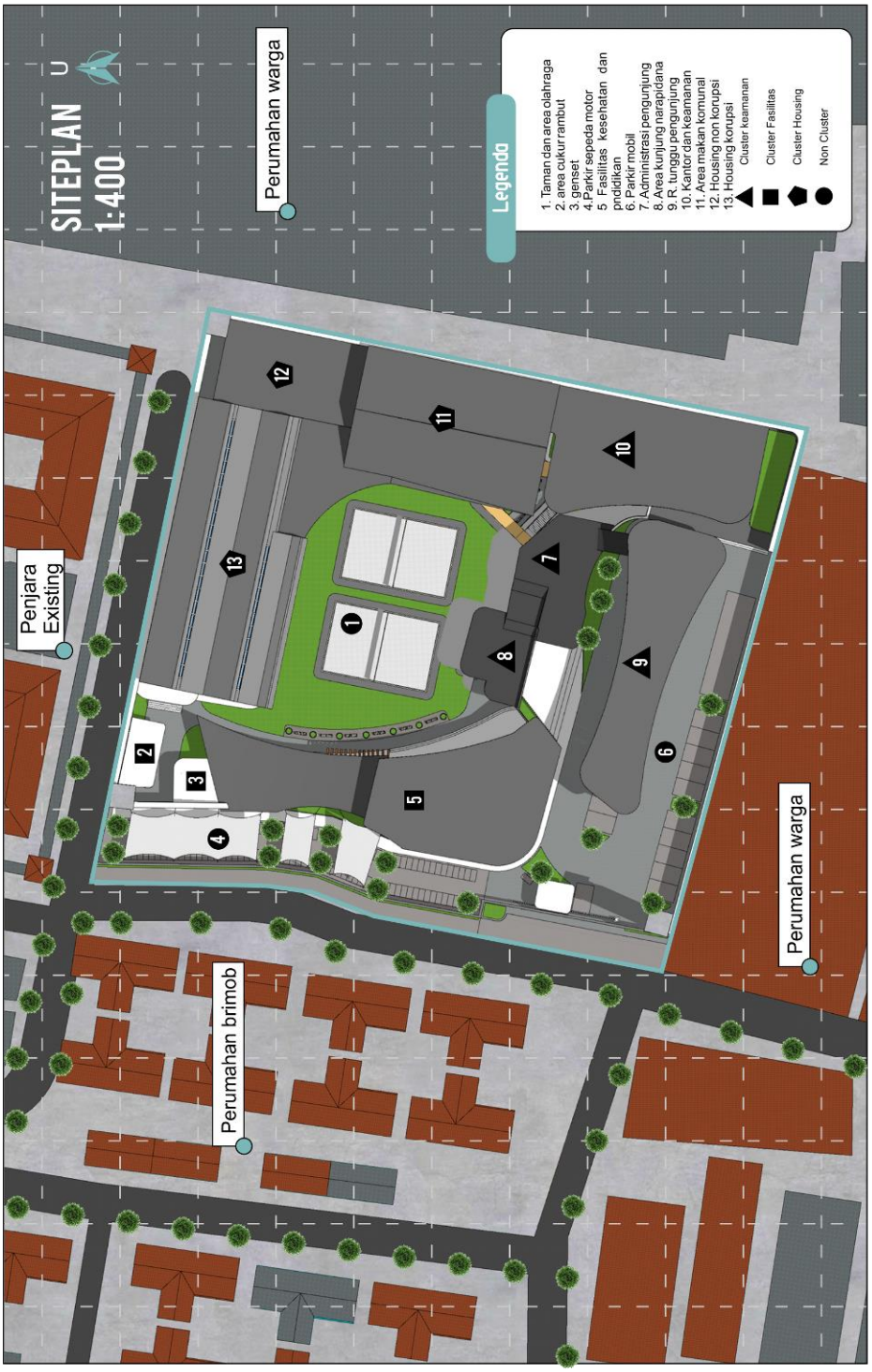

Gambar 5.9 Siteplan

Sumber: Dokumen Pribadi

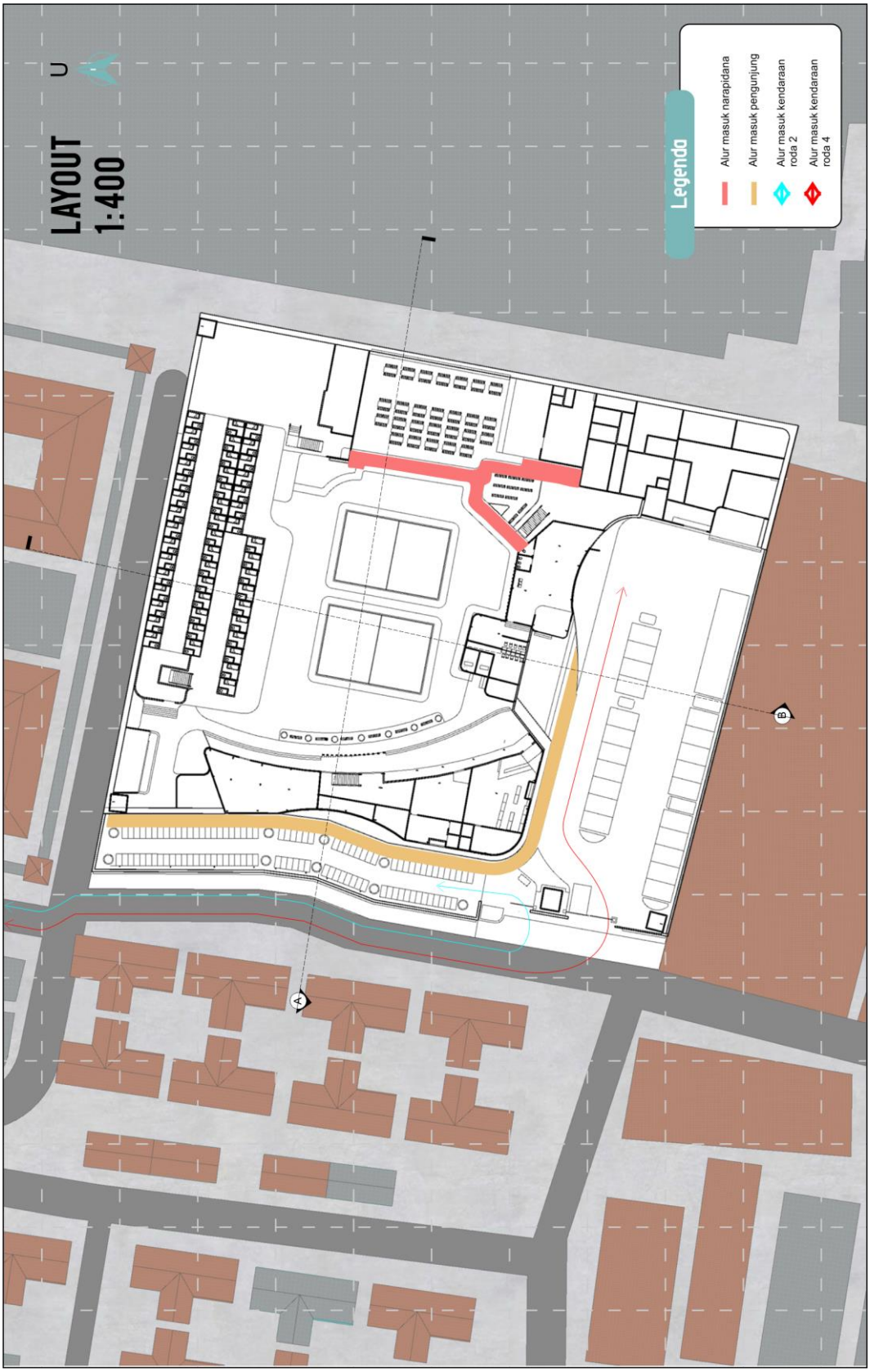

Gambar 5.10 Layout

Sumber: Dokumen Pribadi

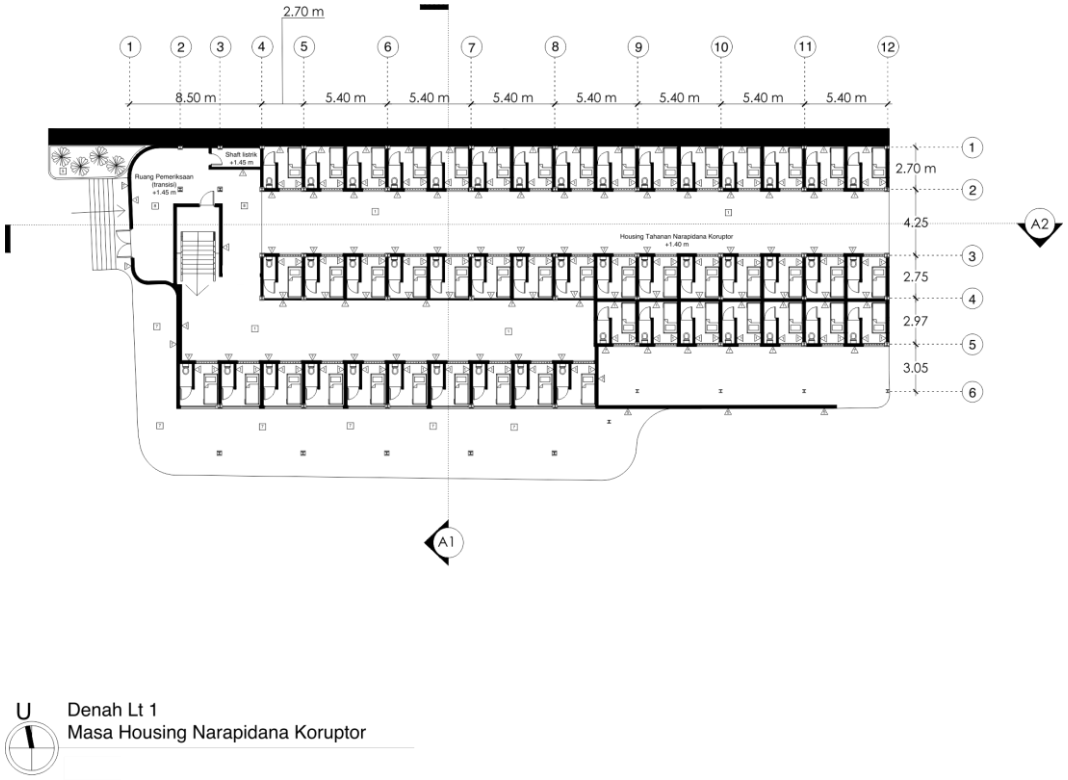

Gambar 5.11 Denah Lt.1 Massa Housing Narapidana Koruptor

Sumber: Dokumen Pribadi

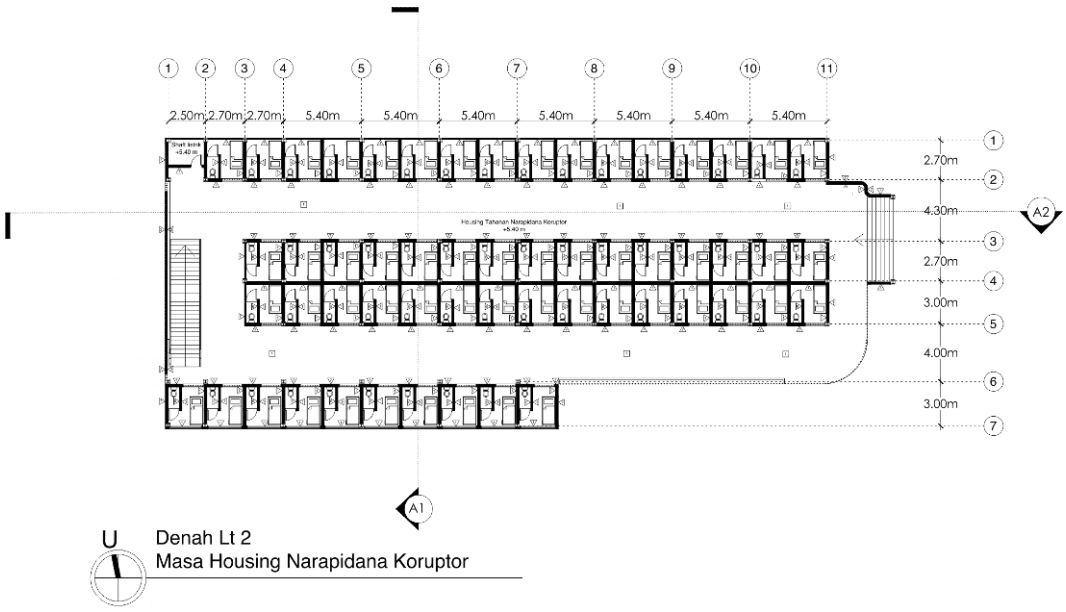

Gambar 5.12 Denah Lt.2 Massa Housing Narapidana Koruptor

Sumber: Dokumen Pribadi

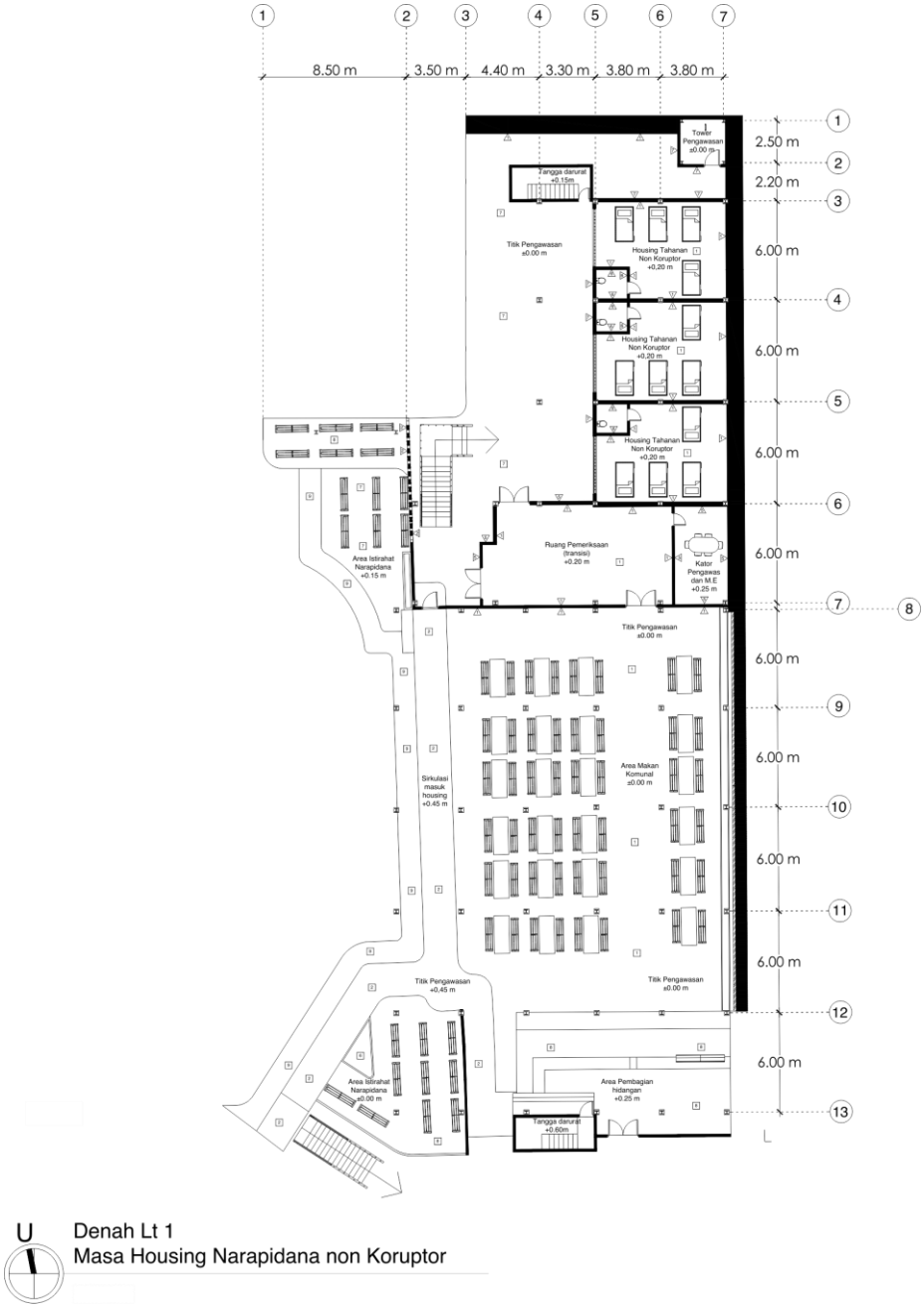

Gambar 5.13 Denah Lt 1 Massa Housing Narapidana non Koruptor

Sumber: Dokumen Pribadi

Pada masa housing narapidana umum lantai satu akan menjadi tempat tahanan maling dan kasus pencurian.

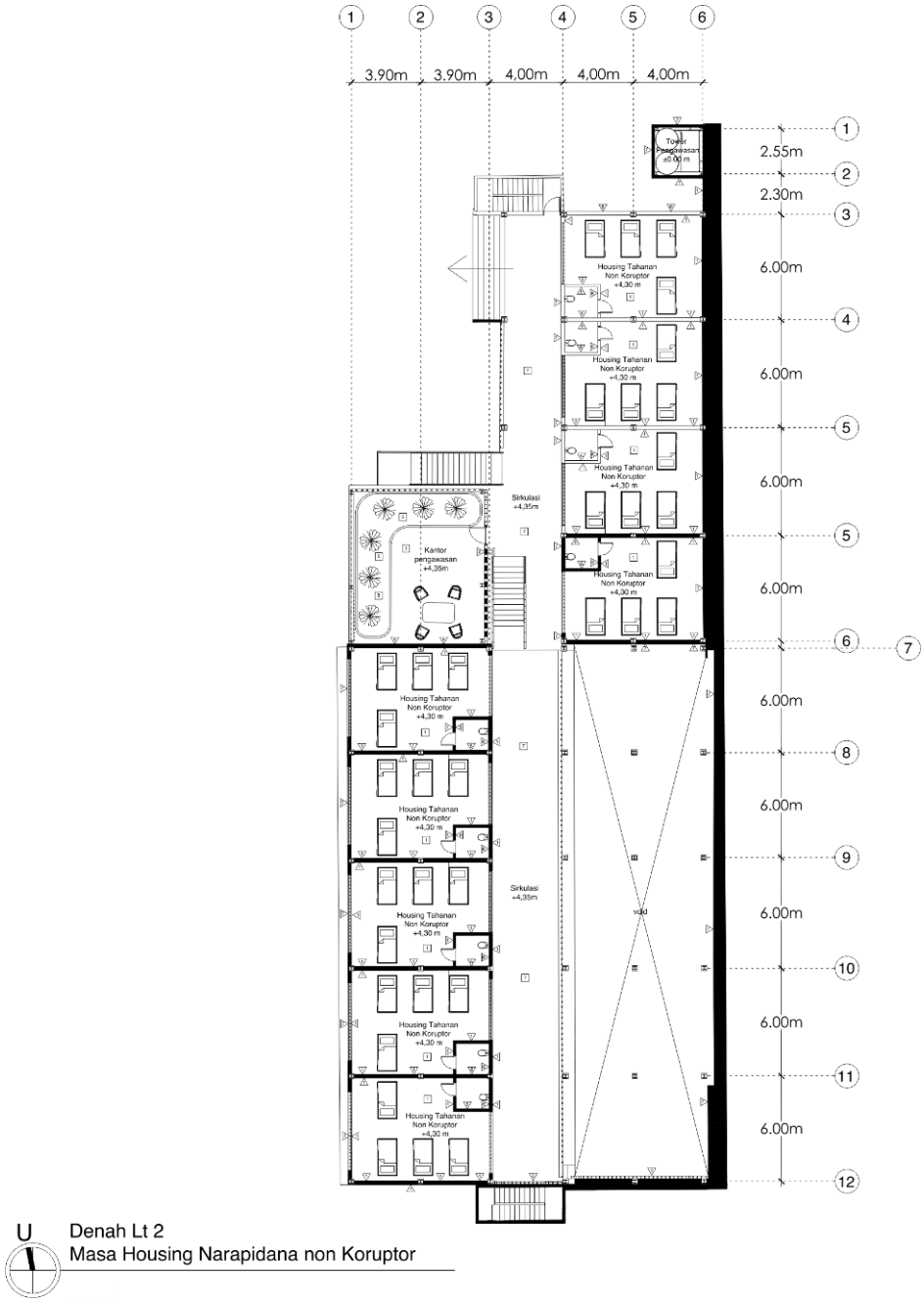

Gambar 5.14 Denah Lt 2 Massa Housing Narapidana non Koruptor

Sumber: Dokumen Pribadi

Pada masa housing narapidana umum lantai dua akan menjadi tempat tahanan kasus pelanggaran atau aktivitas illegal seperti perjudian, penghinaan, pelecehan nama baik.

Gambar 5.15 Denah Massa Keamanan

Sumber: Dokumen Pribadi

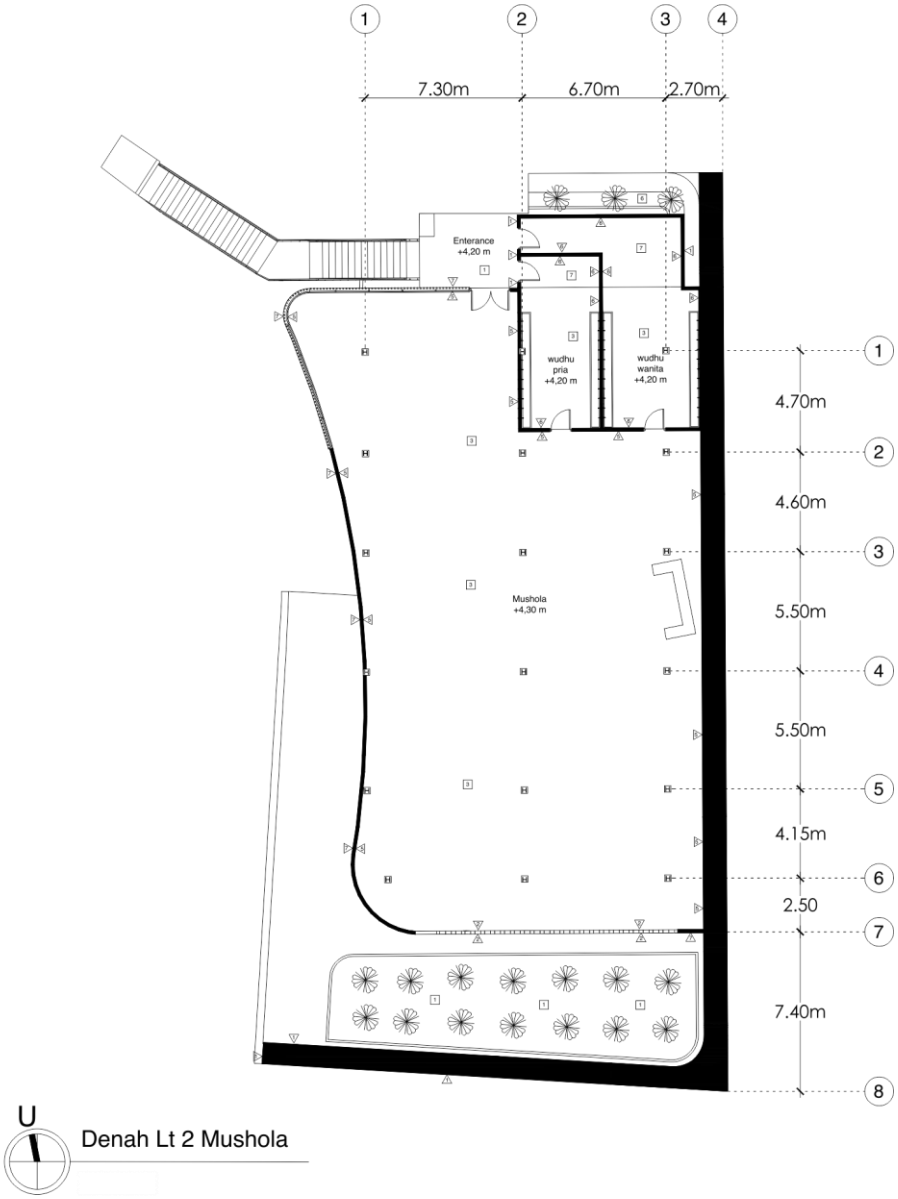

Gambar 5.16 Denah Mushola

Sumber: Dokumen Pribadi

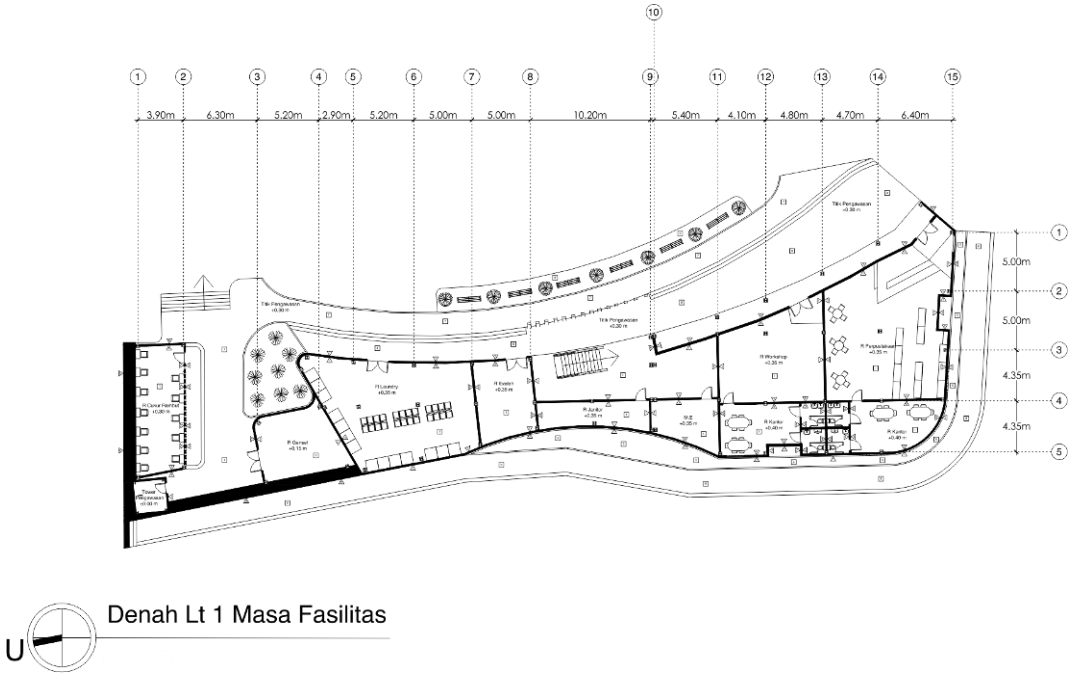

Gambar 5.17 Denah Lt 1 Fasilitas

Sumber: Dokumen Pribadi

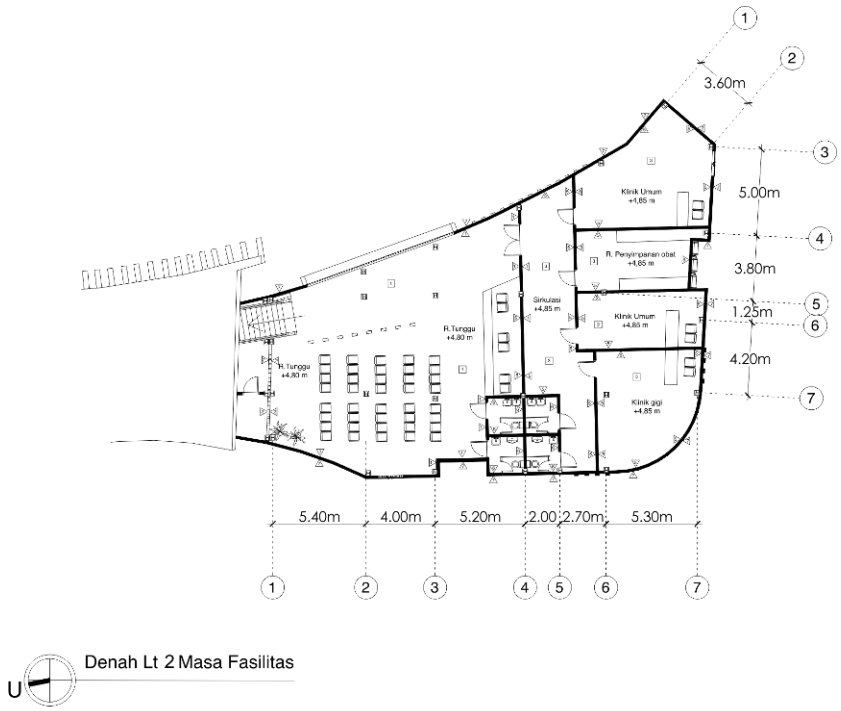

Gambar 5.18 Denah Lt 2 Fasilitas

Sumber: Dokumen Pribadi

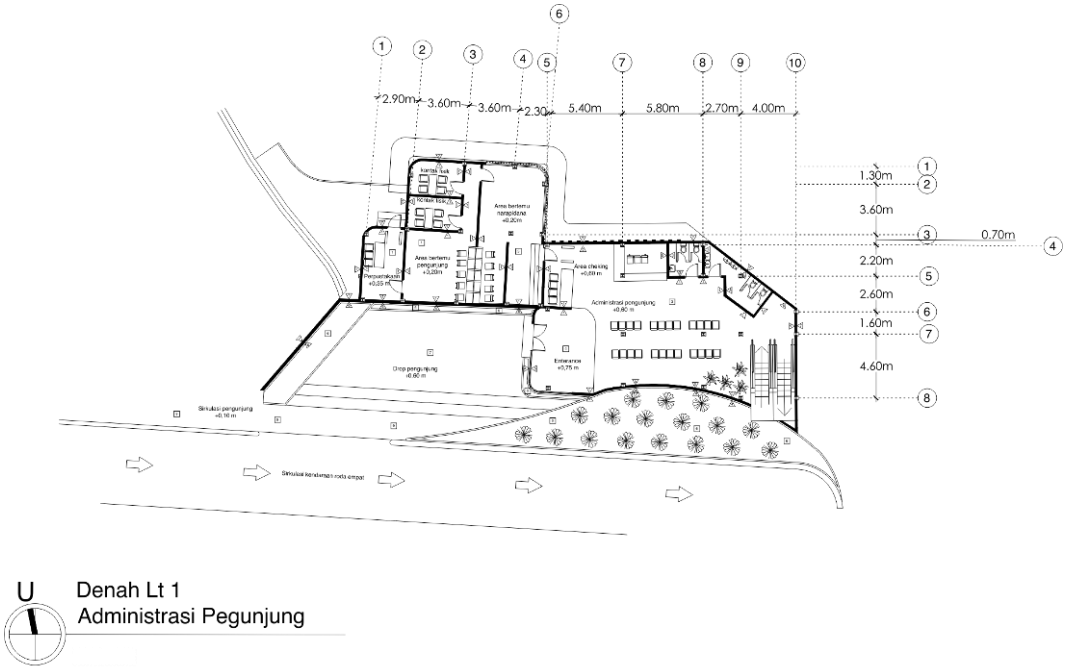

Gambar 5.19 Denah Adnministrasi pengunjung

Sumber: Dokumen Pribadi

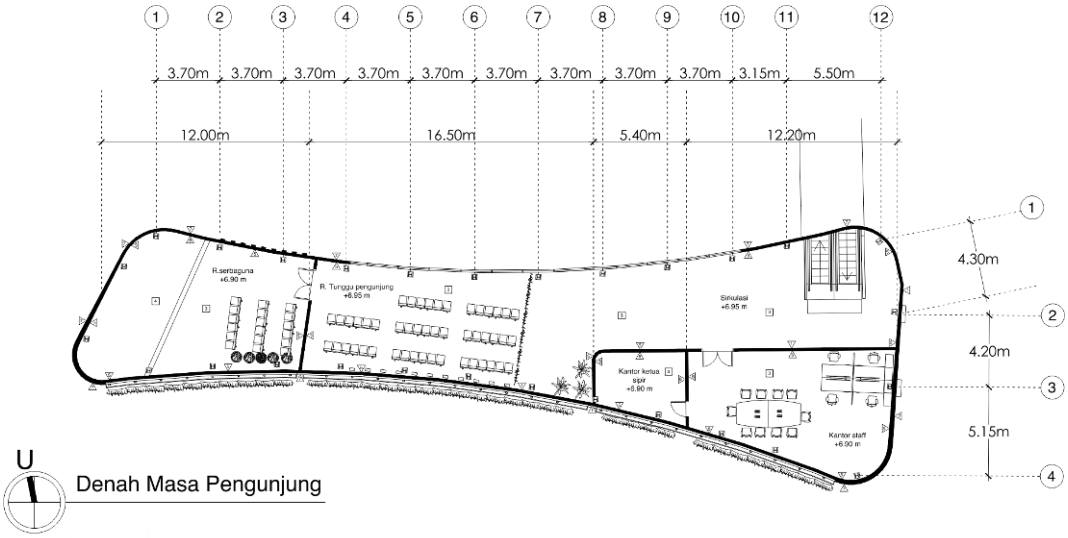

Gambar 5.20 Denah Massa Pengunjung

Sumber: Dokumen Pribadi

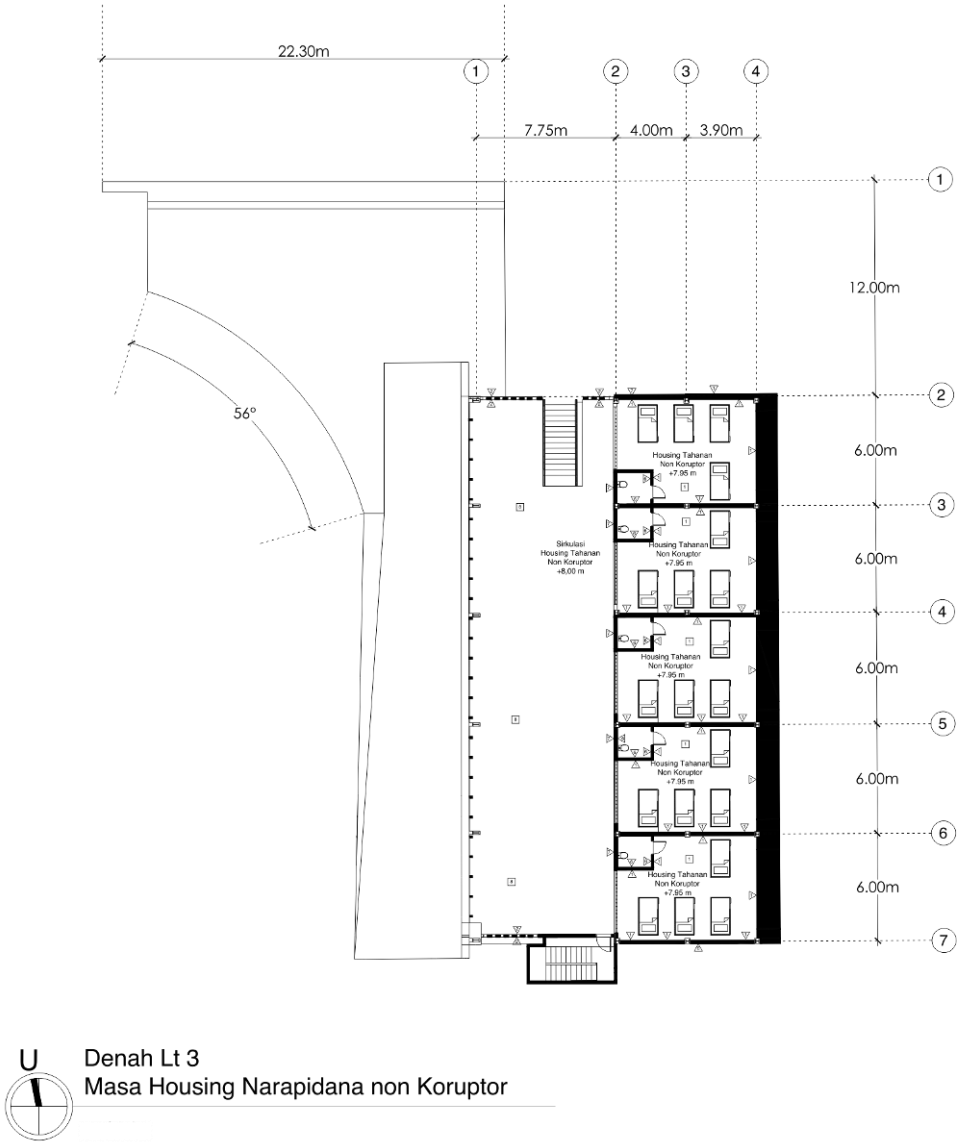

Gambar 5.21 Denah Lt 3 Massa Housing Narapidana non Koruptor

Sumber: Dokumen Pribadi

Pada masa housing narapidana umum lantai tiga akan menjadi tempat tahanan kasus pembunuhan dan pelecehan seksual.

Gambar 5.22 Tampak Selatan

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.23 Tampak Timur

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.24 Tampak Barat

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.25 Tampak Utara

Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.26 Potongan A1,A`

Sumber: Dokumen Pribadi

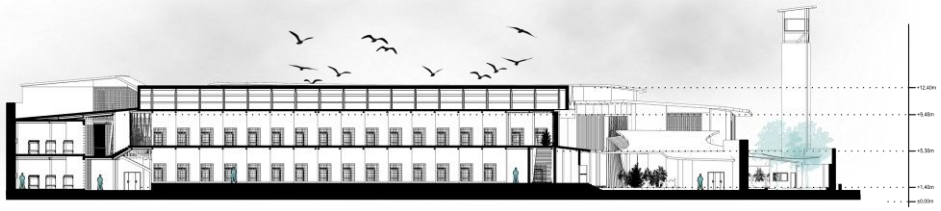

Gambar 5.27 Potongan A2,A2`

Sumber: Dokumen Pribadi

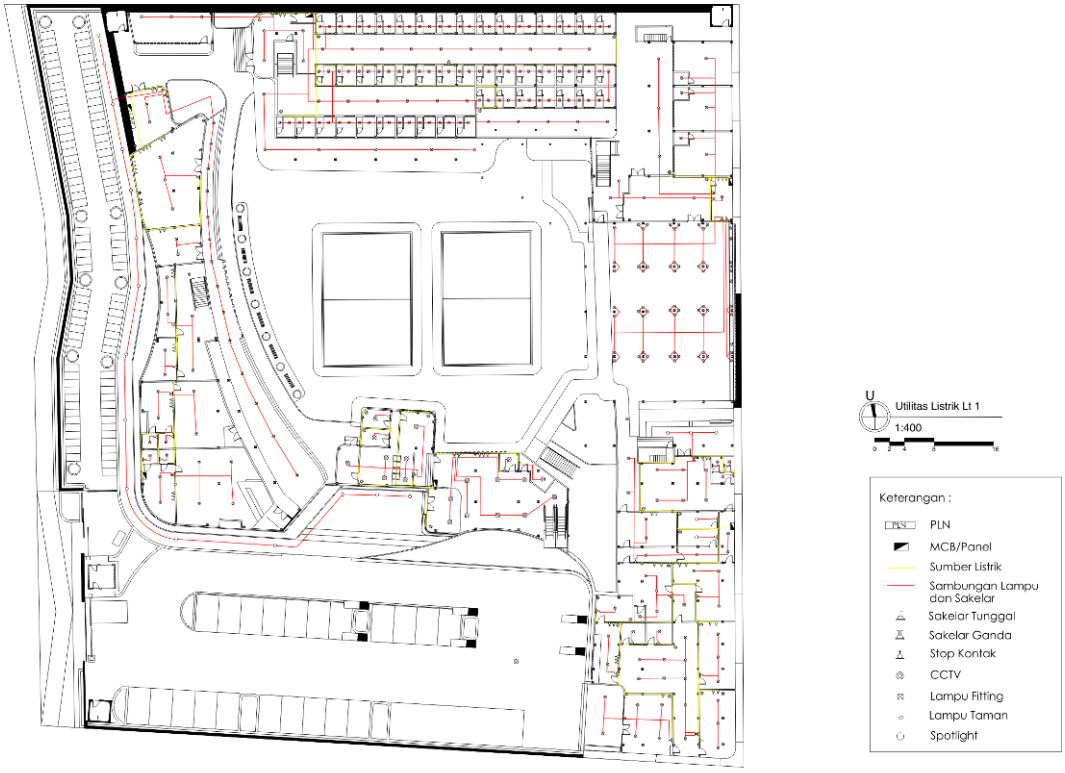

Gambar 5.28 Denah Util Listrik Lt.1

Sumber: Dokumen Pribadi

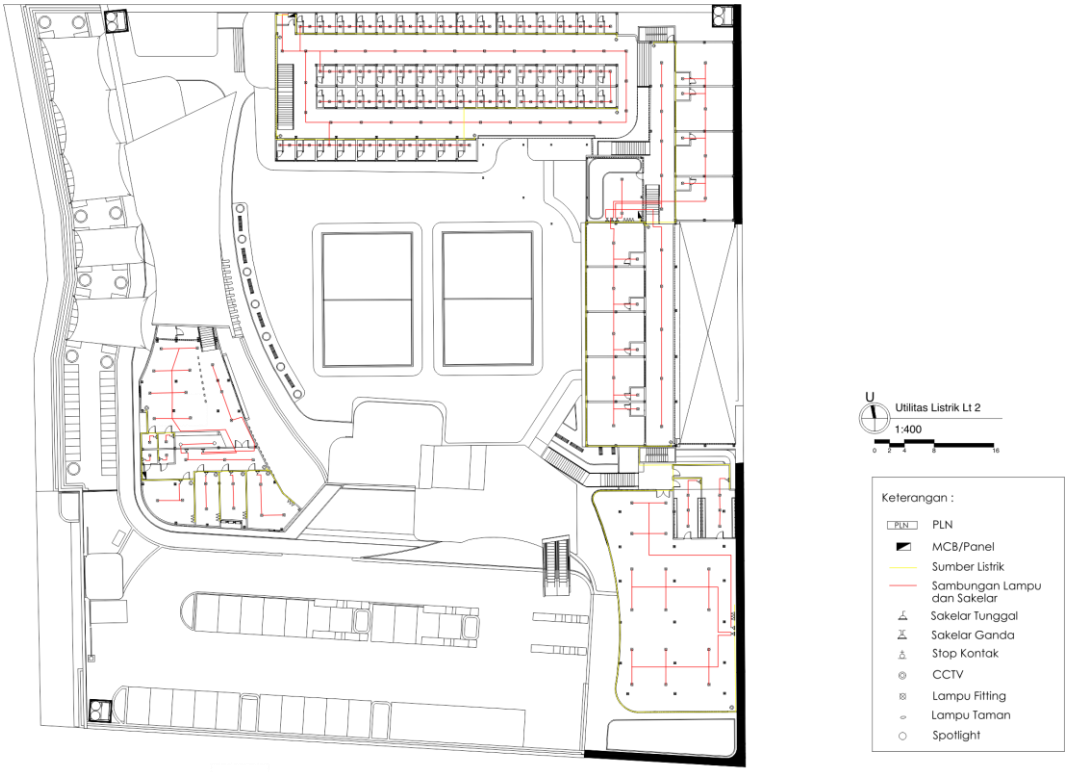

Gambar 5.29 Denah Util Listrik Lt.2

Sumber: Dokumen Pribadi

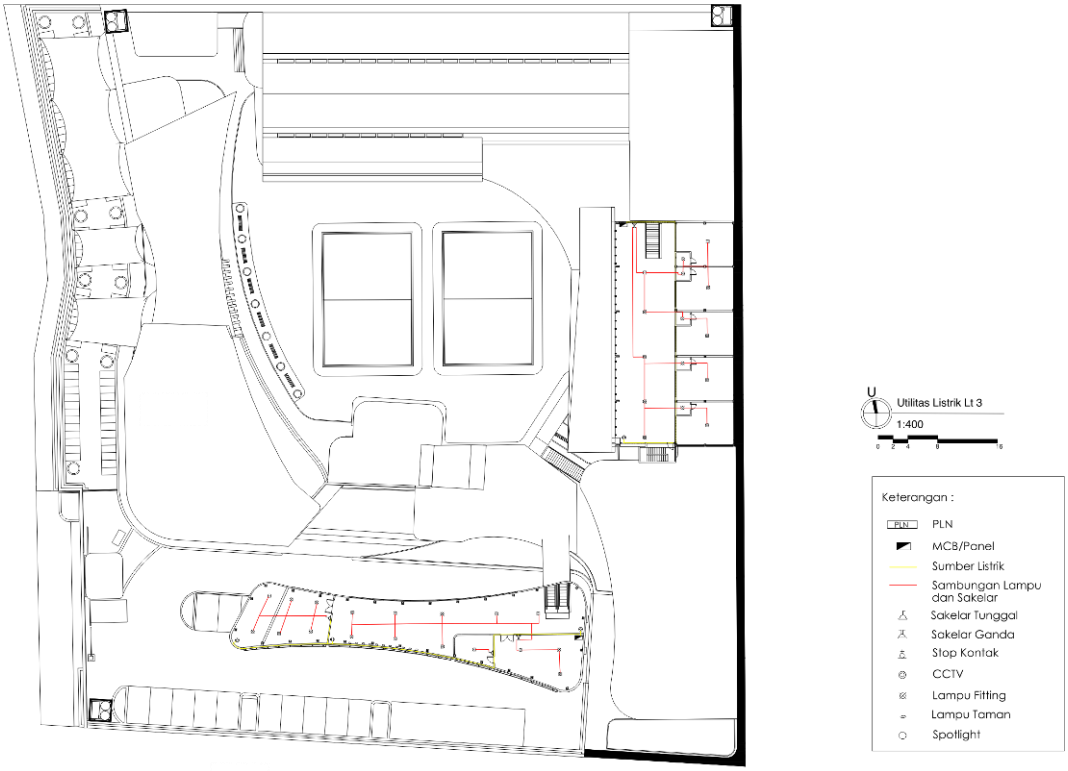

Gambar 5.30 Denah Util Listrik Lt.3

Sumber: Dokumen Pribadi

BAB 6

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan Proposal

Tindak korupsi yang sudah menjadi suatu hal yang terkesan biasa dan menjadi *habbit* yang buruk bagi masyarakat di Indonesia. Mendesak hukum untuk menciptakan sebuah hukuman baru yang dapat membuat jera pelaku koruptor, sekaligus dapat mengurangi kebiasaan korup dikalangan warganya.

Sebuah penjara yang menyasar lebih kepada mental dari user, memberikan *trigger* dengan cara mempermalukan narapidan dan memberikan hukuman berupa melayani masyarakat sekitar, dengan demikian diharapkan perilaku korup dari narapidana dan warganya semakin minim.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

Nadiatus Salama (2014) “Motif dan Proses Psikologis Korupsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi”, IAIN Walisongo Semarang.

Duerk, Donna P, (1993), Architectural Programming : Information Management for Design, J. Wiley, Canada.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 -2029, Pemerintah kabupaten sidoarjo

Fuhrer, Urs. Bridging the Ecological-Psychological Gap: Behavior Settings as Interfaces. Environment and Behavior. Vol. 22: 4, pp. 518-537, 1990.

THE PENALTY FOR THE CORRUPTOR IN THE SOCIOLOGICAL PERSFEKTIF Hukuman Bagi Koruptor dalam Persfektif Sosiologis oleh Syamsul Haling Lecturer of University of Muhammadiyah Palu, Indonesia

Ironi tahanan koruptor di Indonesia, layaknya memenjarakan beruang dalam penjara bambu. https://theconversation.com/id (diakses pada tanggal 03-10-2019)

Indonesia Corruption Report. https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/indonesia/ (diakses pada tanggal 03-10-2019)

The Corruptor’s Prison (2018). @antikorupsi.org-prison (diakses pada tanggal 03-10-2019)

Ending corruption for the long haul.(2015) @thejakartapost.com/news (diakses pada tanggal 03-10-2019)

Initiating Prisons Improvement. https://www.kpk.go.id/en/news/highlights/1004-menggagas-perbaikan-lapas-2 (diakses pada tanggal 03-10-2019)

ICW Sebut 2019 Tahun Lengkap Pelemahan Pemberantasan Korupsi. @www.merdeka.com (diakses pada tanggal 03-10-2019)

Dalam RKUHP, Ancaman Pidana bagi Koruptor Lebih Ringan (2019). @https://nasional.kompas.com/ (diakses pada tanggal 03-10-2019)

The cognitive psychology of corruption Micro-level explanations for unethical behaviour by Kendra Dupuy and Siri Neset. @www.u4.no (diakses pada tanggal 03-10-2019)

VONIS TANPA MENJERAKAN KORUPTOR (2017)@www.antikorupsi.org (diakses pada tangga 03-10-2019)

Kenaikan Indeks Antikorupsi belum signifikan (2019) @mediaindonesia.com (diakses pada tangga 03-10-2019)

ICW: 79% Vonis Hukuman Pidana Korupsi Masih Ringan (2019). @katadata.co.id/berita (diakses pada tangga 03-10-2019)

UNOPS, (2016) TECHNICAL GUIDANCE FOR PRISON PLANNING , Technical and operational considerations based on the Nelson Mandela Rules

Joshep De Chaira, (1987) Time Saver Standard for building types 2nd edition

Neufert, Ernst, (2002), Data Arsitek Jilid 2, Erlangga, Jakarta.

Aplication of Shaming Punishment for Corruptors in The Corruption Law Enforcement System in Indonesia Dr. Bachtiar (2018)

Bierbauer, Guter, 1984. "Toward an Understanding of Legal Culture: Variations in Individualism and Collectivism between Kurds, Lebanese and Germany", Law and Society Review, No. 28.

Friedman, Lawrance M., 1975. The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation.